

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR
(Studi Kasus di Kota Makassar)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

RADIATY

NIM: 10300112039

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radiaty
NIM : 10300112039
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam Terhadap Tindak
Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus di Kota Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 12 Februari 2016

Penyusun,

RADIATY
NIM: 10300112039

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus di Kota Makassar)", yang disusun oleh Radiaty, NIM: 10300112039, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 21 Maret 2016 M, bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 23 Maret 2016 M.
13 Jumadil Akhir 1437 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Munaqisy II	: Rahmiati, S. Pd., M. Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Marilang, SH., M. Hum	(.....)
Pembimbing II	: Subehan Khalik, S. Ag., M. Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut Nama Allah s.w.t. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah s.w.t. Tuhan Semesta Alam atas nikmat Iman, nikmat Ilmu, nikmat kesehatan, nikmat kasih sayang dan begitu banyak nikmat Allah s.w.t. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kami Muhammad s.a.w., keluarga dan sahabat.

Selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tak henti-hentinya Allah s.w.t. melimpahkan beragam nikmatnya dan dibawah bimbingan para pendidik sehingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelas Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, serta para wakil Rektor dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, beserta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati., M. Si selaku ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Ibu Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi selaku sekretaris Jurusan

Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, dan Kak Cenci selaku staf Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak Dr. Marilang, SH., M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Subehan Khalik, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan mulai dari judul hingga selesainya skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
6. Kepada kedua Orang Tua yang Tercinta yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penyusun, semoga Allah s.w.t. senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya, Kasih Sayang-Nya, dan Maghfirah-Nya kepada keduanya, serta keluarga besar penyusun yang selalu membantu dan mendukung selama ini.
7. Bapak/Ibu Kepala Instansi Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar yang telah memberikan izin kepada penyusun dalam melakukan penelitian di Instansi yang beliau pimpin sehingga data yang menunjang skripsi ini bisa didapatkan.
8. Bapak/ Ibu Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, dan seluruh stafnya serta Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan lain yang telah memberikan fasilitas, tempat dan waktu bagi pelaksanaan penelitian.
9. Terkhusus pula untuk teman-teman seperjuangan: Haerul Akram, Husnah, Ummul, Vina, Nilma, Askina, Agus, Khaer, Rahmi, Ethy, Sadli, Putri, dan seluruh teman-teman grasi HPK 012 yang tidak dapat penyusun sebut satu

persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini. Kalian adalah yang Terbaik.

Akhir kata semoga Allah s.w.t. memberikan balasan berlipat ganda kepada semua yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penyusun berharap agar skripsi ini dapat diterima bagi khlayak umum, maka dari itu saran dan kritik yang membangun penyusun harapkan demi menambah wawasan dan cakrawalan pemikiran .

Samata, 12 Februari 2016

Penyusun,

RADIATY

NIM: 10300112039

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11-45
A. Pengertian Kriminologi	11
B. Pengertian Pencurian	20
1. Pencurian Menurut KUHP	21
2. Pencurian Menurut Hukum Islam	27
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian	39
BAB III METODE PENELITIAN	46-50
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	46

B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpul Data	48
E. Instrumen Penelitian	49
F. Teknik Pengolahan dan analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51-80
A. Data Pencurian Motor di Kota Makassar	51
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Motor di Kota Makassar	61
C. Upaya Pemberantasan Pencurian Motor di Kota Makassar	69
1. Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Motor menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	69
2. Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Motor menurut Hukum Islam	76
BAB V PENUTUP	81-83
A. Kesimpulan	81
B. Implikasi Penelitian	82
DAFTAR PUSTAKA	8-88
PEDOMAN WAWANCARA	89-91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Pencurian Motor di Polrestabes Makassar dirinci menurut Tahun 2010-2014.....	51
Tabel 1.1: Hari Kejadian Tindak Pidana Pencurian Motor	53
Tabel 1.2: Tanggal Kejadian Tindak Pidana Pencurian Motor.....	53
Tabel 1.3: Jam Kejadian Tindak Pidana Pencurian Motor	54
Tabel 1.4: Modus dalam Tindak Pidana Pencurian Motor	55
Tabel 2: Data Pencurian Motor di Kejaksaan Negeri Makassar dirinci menurut Tahun 2010-2014.....	56
Tabel 3: Data Pencurian Motor di Pengadilan Negeri Makassar dirinci menurut tahun 2010-2014	57
Tabel 4: Data Pencurian Motor di Pengadilan Negeri Makassar dirinci menurut Putusnya Perkara	58
Tabel 5: Data Pencurian Motor di Pengadilan Negeri Makassar dirinci menurut pasal yang dilanggar	59

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	i	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ الرَّوَضَةُ : *raudah al- atfal*

الْقَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al- Jalaalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِاللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

s.w.t	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
s.a.w	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...38	= QS. Al-Maidah/5:38
HR	= Hadis Riwayat
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
h	= Halaman

ABSTRAK

Nama Penyusun : Radiaty
Nim : 10300112039
Judul : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus di Kota Makassar)

Skripsi ini merupakan studi tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di kota Makassar. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan di akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang seseorang untuk memiliki setiap benda milik orang lain. Berdasarkan hal tersebut penyusun mengambil rumusan masalah dalam skripsi yaitu: Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian motor di kota Makassar dan Bagaimana memberantas pencurian motor di kota Makassar menurut KUHP serta Bagaimana memberantas pencurian motor di kota Makassar menurut Hukum Islam?.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan kriminologi dan pendekatan normatif Syar'I (Hukum Islam). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa penelitian lapangan yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi serta data sekunder berupa pengumpulan data dengan melihat berbagai referensi seperti jurnal, buku-buku, dokumen, dan bahan bacaan lainnya. Dalam hal ini menggunakan alat-alat seperti buku catatan, dan pedoman wawancara. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi dan mencatat hasil catatan lapangan.

Dari uraian proses pengkajian tersebut, maka diperoleh suatu analisa dengan kesimpulan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pencurian motor yaitu karena adanya 2 faktor yakni faktor Internal dan faktor Eksternal. Adapun upaya untuk memberantas tindak pidana pencurian motor menurut KUHP ada 3 yaitu upaya Pre-Entif, Preventif dan Represif. Serta adapula upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana pencurian motor menurut Hukum Islam yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan Agama di Usia dini, dan memberi bimbingan, arahan serta pembinaan Agama di Lembaga Pemasayarakatan.

Adapun Implikasi dalam Penelitian ini yaitu masyarakat harus ikut turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan, dan haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama samawi yang senantiasa berlaku dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat (umat manusia). Dalam Islam telah ada seperangkat aturan-aturan dan norma-norma yang harus dilalui ummat manusia dalam rangka mencegah dan mengantisipasi kerusakan, mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda aturan jalan yang harus dilalui. Dalam hukum pidana Islam terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang bertujuan menjaga dan mencegah serta menghindari terjadi tindak pidana terhadap seseorang yang mengancam jiwa dan hartanya.

Bahkan menurut Topo Santoso¹ menyebutkan tujuan hukum pidana Islam sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dalam syariat, karena apabila kebutuhan ini tidak terjamin maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.
2. Menjamin keperluan hidup yakni keperluan sekunder atau disebut *hajiyyat*, karena mencakup berbagai fasilitas penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka.

¹Abdi Wijaya, *Penerapan Hukum Pidana Islam menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press), h. 3.

3. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mampu mengatur urusan hidup lebih baik.

Masyarakat awam tidak banyak memahami hukum pidana Islam secara benar dan mendalam. Mereka hanya menganggap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam bila dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka tidak mengetahui tentang sistem hukum pidana Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaannya. Demikian halnya dengan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan dilaksanakan *had* potong tangan. Berbeda dengan sistem hukum barat, masyarakat menganggap bahwa hukum barat sesuai dengan konsep hak asasi manusia dan memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa hukum barat yang juga digunakan di Indonesia sudah sempurna dan lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan, lain dengan hukum Islam yang terkesan kejam dan hanya diperuntukan bagi umat Islam saja, sedangkan umat selain Islam tidak diakomodir. Anggapan tersebut sebenarnya adalah anggapan yang salah, akan tetapi anggapan tersebut sudah ada bahkan sudah mempengaruhi jalan pikiran masyarakat.²

Hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna, mencakup semua aspek kehidupan baik menyangkut hubungan antara manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan

²Isna Wiqoya, "Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perseptif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 1

dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*al maqasid as syari'ah*) yang terdapat dalam lima tujuan syari'at yaitu: memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, kehormatan dan memelihara harta benda.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan pun juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan. Sedangkan hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah dapat dikatakan usang. Kalaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus dan tidak bersifat global, dan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang layak digunakan yang khusus (*lex speciale*) atau global (*Lex generale*). Hal ini, berakibat pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.³

Bahkan kejahatan terhadap harta tersebut seringkali dilakukan dengan kekerasan. Hal ini, mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan. Sanksi tindak pidana terhadap harta khususnya dalam hal tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam KUHP Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 362 berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁴

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti

³Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 193.

⁴Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, KUHPdt)* (Cet. VIII; Jakarta: Visimedia, 2013), h. 86.

politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁵

Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang seseorang untuk memiliki setiap benda milik orang lain.

Dan Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam QS. al-Maidah/5: 38, sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{٣٨}

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶

⁵Berdy Despar Margrhobi, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”, *Skripsi*, (Malang: Fak. Hukum Universitas Brawijaya, 2014) h. 1.

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *niṣḥab*. Jika tidak mencapai *niṣḥab*, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir*

Pada tahun-tahun terakhir semakin banyak terjadi kejahatan terhadap harta atau pencurian. Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik.⁷

Melihat jumlah kejahatan yang dilakukan anak muda di Jakarta untuk kasus Pencurian mulai tahun 1961 sampai 1966 itu semakin meningkat karena pada tahun 1961 jumlah perkara pencurian sebanyak 180 kasus dan meningkat pada tahun 1962 sebanyak 299 sampai pada tahun 1966 berjumlah 536 kasus pencurian.⁸ Sedangkan untuk tindak pidana pencurian motor di Kota Makassar setiap tahunnya meningkat mulai tahun 2010 hingga 2014. Karena pada tahun 2010 jumlah perkara yang dilaporkan yaitu 698 kasus meningkat hingga tahun 2014 sebanyak 1440 kasus.⁹

Ketentuan hukuman bagi pencurian telah diatur dalam KUHP dan juga dalam al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya. Dari terjemahan ayat tersebut sudah sangat jelas

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syaamil quran, 2012), h. 114.

⁷Isna Wiqoya, "Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perseptif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, h. 3.

⁸J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputra, *Parados dalam Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 35.

⁹Data yang diperoleh dari Kantor Polrestabes Makassar pada tanggal 21 Januari 2016.

bahwa sanksi bagi pelaku pencuri itu sangatlah kejam dan akan memberi efek yang jera, tapi pada kenyataannya masih banyak pula orang yang melakukan pencurian.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial, maka jika ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya dimulai dari akar permasalahan terlebih dahulu. Karena permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, maka dapat diketahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja. Akan tetapi, juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.¹⁰

Dari uraian-uraian tersebut, penyusun hendak meninjau permasalahan tindak pidana Pencurian motor di Kota Makassar yang dipandang dari Hukum Islam dan kriminologi, sehingga penyusun menarik pembahasan dengan judul “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian motor (Studi Kasus di Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yaitu bagaimana tinjauan kriminologi dan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian motor (studi kasus di kota Makassar) dan adapun sub masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian motor di kota Makassar?
2. Bagaimana memberantas pencurian motor di kota Makassar menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)?

¹⁰Berdy Despar Margrhabi, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”, *Skripsi*, h. 3.

3. Bagaimana memberantas pencurian motor di kota Makassar menurut hukum Islam?

C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian

Adapun Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Deskripsi Fokus

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penyusun akan mendeskripsikan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting :

- a. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹¹
- b. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qu'ran dan hadits atau Hukum *Syara'*.¹²
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹³
- d. Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan itikad tidak baik.¹⁴
- e. Motor adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda atau kendaraan agar bisa bergerak atau beroperasi.

2. Fokus Penelitian

¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Cet. XIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 9.

¹²Kamus Bahasa Indonesia online. "Hukum Islam", *official website kamus Bahasa Indonesia online*.<http://kamusbahasaIndonesia.org/HukumIslam> (17 Oktober 2015).

¹³M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 608.

¹⁴Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Makassar,: Alauddin University Press, 2014), h. 83.

Penelitian ini difokuskan pada pencurian motor di kota Makassar, utamanya menyangkut faktor penyebab dan cara memberantas tindak pidana pencurian motor.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian Pustaka ini, penyusun menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ambo Asse dalam bukunya *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi s.a.w.* menjelaskan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan hukuman *ḥad* potong tangan¹⁵, namun dalam buku ini tidak menjelaskan cara pelaksanaan potong tangan bagi pelaku pencurian hanya mengatakan bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya dan tidak memberi penjelasan yang lebih rinci, tetapi lebih menjelaskan pelaksanaan potong tangan bagi pelaku perampokan.
2. Dalam buku Hamzah Hasan yang berjudul *Hukum Pidana Islam I* menjelaskan tentang tindak pidana pencurian dan hukuman untuk tindak pidana pencurian menurut hukum Islam¹⁶ saja, namun tidak menjelaskan hukuman pencurian terhadap tinjauan yuridis dan penyebab seseorang melakukan pencurian.
3. Dalam buku Abdi Wijaya yang berjudul *Penerapan Hukum Pidana Islam I menurut Mazhab Empat telaah Konsep Hudud* menjelaskan tentang beberapa unsur-unsur pencurian dan beberapa pandangan ulama terhadap cara pelaksanaan potong tangan bagi pelaku pencurian dan gugurnya hukuman

¹⁵Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi s.a.w.* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 87.

¹⁶Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I*, h. 84.

potong tangan serta syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan,¹⁷ namun didalam buku ini tidak menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan hukuman bagi pelaku pencurian menurut hukum Nasional serta tidak membahas tentang sebab orang melakukan tindak pidana pencurian dan akibat yang ditimbulkan dari potong tangan tersebut terhadap pelaku pencurian.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian motor di kota Makassar;
- b. Untuk mengetahui cara memberantas pencurian motor di kota Makassar menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Untuk mengetahui cara memberantas pencurian motor di kota Makassar menurut Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis

Karya tulis ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum dibidang pencurian motor sehingga dapat menjadi referensi bagi ilmuan hukum pidana.

- b. Kegunaan Praktis

¹⁷Abdi Wijaya, *Penerapan Hukum Pidana Islam menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud)*, h. 164.

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada para praktisi hukum yang berkompeten menangani masalah pencurian motor pada khususnya di kota Makassar dan pada umumnya di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata “crime” dan “logos”. Crime berarti kejahatan, sedang “logos” berarti ilmu pengetahuan jadi secara umum kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk sebab dan akibat kekerasan.

Menurut Rusli Effendy Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, obyeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan sosiologi maupun ekonomis.¹

Sementara itu Romli Atmasasmita membedakan kriminologi dalam 2 arti, yaitu:

1. Kriminologi dalam arti sempit, ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.
2. Kriminologi dalam arti luas, ialah ilmu yang mempelajari tentang penologi (perkembangan hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.

¹Rusli Effendy, *Asas Hukum Pidana 1* (Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi Unhas, 1978), h. 9.

Secara tegas, menurut Romli Atmasasmita, dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana.²

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, Soedjono Dirjosisworo memberikan batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu:

1. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mampu mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya:

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal ialah pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

²Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Aditama, 2005), h. 5.

3. Psikologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminil yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik (*Policie scientifique*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.³

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of Knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 10.

1. Sosiologi Hukum yakni kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.⁴

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurut definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 11.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach merumuskan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.⁵

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan, dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 12.

Dari uraian terdahulu, secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Dalam Khasanah literatur kriminologi, banyak sekali perdebatan yang kontraversil mengenai pengertian dari ketiga obyek studi ini. Oleh Soerjono Soekanto dan kawan-kawan⁶, pendapat para sarjana ini dibagi atas golongan-golongan sebagai berikut:

1. Para Sarjana Yang Menganut Aliran Hukum Atau Yuridis

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh Pengadilan Pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili para pembentuk undang-undang pidana. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan definisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara

⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 13.

berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal defenitions) mengenai kejahatan.⁷

Alasan diterimanya definisi yuridis tentang kejahatan ini oleh Hasskel dan Yablonsky adalah:

- a. Statistik kejahatan sosial berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dalam penjara. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti-sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan apapun;
- b. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti-sosial;
- c. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana);
- d. Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif.⁸

2. Para Sarjana yang Menganut Aliran Non Yuridis atau dikenal sebagai Aliran Sosiologis

Menurut Thorsten Sellin mengutarakan bahwa pemberian batasan definisi kejahatan secara yuridis ini tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma

⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 14.

⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 15.

kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat.

3. Pandangan Kriminologi Baru tentang Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Masyarakat

Menurut Robert F Meier mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya, guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa.

Suatu catatan kritis terhadap pemikiran ini diungkapkan oleh Paul Mudigdo. Dinyatakan bahwa kadar kebenaran dan nilai-nilai praktis dari teori kritis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi kongkrit demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang diterbelakangkan, guna memperbaiki posisi hukum atau pengurangan keterbelakangan mereka dalam masyarakat.⁹

W.H. Nagel, Kriminologi pasca Perang Dunia II semakin luas, tidak semata-mata *etiology* (etiologi), karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi

⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 17.

(Ilmu yang mempelajari hubungan antara pelaku kejahatan dengan korbannya). Perkembangan sosiologi hukum semakin memperluas lingkup kriminologi.¹⁰

Martin L. Haskell, Kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:

- a. Sifat dan luas kejahatan;
- b. Sebab-sebab kejahatan (etiologi);
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- d. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
- e. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Lebih lanjut Herman Mannheim (1965) menyatakan bahwa juga termasuk ke dalam lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang.¹¹

Bawengan, kriminologi mempelajari perkembangan dan pertumbuhan perilaku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan perilaku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan dalam bentuk individual maupun terorganisasi termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para penjahat. Kriminologi mempelajari pula sebab musabab kejahatan dengan cara membanding-bandingkan pribadi dan perilaku penjahat tertentu dengan pelaku yang lain. Lebih lanjut Bawengan mengatakan bahwa, kriminologi tidak sekedar berbagai bidang lain, misalnya sosiologi, ekonomi, psikhiatri, religi kriminologi pun diperlukan dalam rumah tangga dan organisasi-

¹⁰Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), h. 13.

¹¹Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, h. 14.

organisasi masyarakat, termasuk pula polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.¹²

Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia.

B. Pengertian Pencurian

Mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambil dari tempat penyimpanan.¹³ Sedangkan pencuri adalah orang yang mengambil barang orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki. Pengertian dimaksud ada beberapa perilaku manusia yang serupa tetapi tidak sama dengan pencuri: yaitu: 1) menipu. Menipu adalah mengambil hak orang lain secara licik, sehingga orang lain menderita kerugian; 2) Korupsi. Korupsi adalah mengambil hak orang lain, baik perorangan maupun masyarakat dengan menggunakan kewenangan atas jabatan dan atau kekuasaannya; 3) Menyuap. Menyuap yaitu seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang dan atau uang maupun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik material atau moril, sedang pemberian itu menyebabkan ruginya pihak lain.¹⁴ Dan pencurian adalah suatu perbuatan jahat yang merugikan diri pribadi dan masyarakat.

Menurut M. Arfin Hamid, mencuri adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Syaratnya harta tersebut diambil dari

¹²Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 2.

¹³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Bari Algensindo, 2010), h. 440.

¹⁴Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 69.

tempat penyimpanan, dan harta tersebut bukan harta yang *syubhat*, baik diambil siang maupun malam hari, termasuk pencuri itu sendiri atau bersama yang lain, tempat tersembunyi maupun tempat terbuka, membawa senjata atau tidak.¹⁵

1. Pencurian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

a. Pengertian Pencurian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian, yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda sebagai berikut:

“Hij die eening goed dat geheel of ten deele aan eenander toebehoort weгнаamt, met het Oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt , als shuldning aan diefstal, Gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste Negen hundred gulden.”

Artinya:

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.¹⁶

Menurut Poerdarminta Pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara tidak sah.

¹⁵M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesia (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)* (Cet. I; Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), h. 250.

¹⁶Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

Soerjono Soekanto secara umum pencurian adalah suatu tindakan seseorang dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak.

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (Fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan.¹⁷ Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

b. Unsur-unsur Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1) Pencurian biasa

Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- a) Unsur Subjektif, yaitu: *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum.
- b) Unsur-unsur objektif, yaitu:
 - (1) *Hij* atau barangsiapa
 - (2) *Wegnemen* atau mengambil
 - (3) *Eenig goed* atau sesuatu benda
 - (4) *Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹⁸

¹⁷Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Jambatani, 2003), h. 71.

¹⁸Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, h. 2.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja, karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan sengaja atau *culpoos diefstal*. Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur:

- a) Mengambil;
- b) Sesuatu benda;
- c) Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- d) Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- a) Harus ada perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain.

- b) Yang diambil harus sesuatu barang

Termasuk ke dalam suatu “benda atau barang” adalah juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis.¹⁹

- c) Barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

¹⁹Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Cet. II; Bandung: Sinar Baru, 1985), h. 214

Barang yang sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain juga kategorikan dalam unsur-unsur pencurian. Dimana maksud dari seluruhnya yaitu barang tersebut seluruhnya milik orang lain dan tanpa ada hak sedikit pun dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang yang sebagian yaitu barang yang dimana ada hak dari barang tersebut.

d) Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum (melawan hak).

Untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, misalnya seseorang yang menemukan sesuatu benda, kemudian mengambilnya dan menyimpannya di suatu tempat dan setelah itu menguasai benda tersebut secara melawan hukum, telah melakukan penggelapan. Termasuk juga apabila seorang pelaku sejak mengambil suatu benda itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada orang lain, jadi bukan untuk dikuasai bagi dirinya sendiri, barulah ia dapat melaksanakan maksudnya itu setelah ia menguasai benda tersebut. Ini berarti, bahwa tidak setiap perbuatan mengambil barang orang lain itu merupakan penguasaan atas benda tersebut.²⁰

2) Pencurian Ringan

Pencurian ringan yang diatur didalam KUHP Pasal 364 adalah pencurian yang mana jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-). Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,) tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 250.000,-).

3) Pencurian dalam bentuk diperberat

²⁰Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, h. 215.

Pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP baik ayat 1 maupun ayat 2. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - (1) Pencurian ternak;
 - (2) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - (3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
 - (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- b) Jika pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²¹

4) Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam pasal 363 KUHP kecuali unsur di jalan umum, didalam kereta api atau term yang sedang berjalan. Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Yang perlu untuk diketahui dalam pasal ini bahwa, unsur ancaman kekerasan di sini dimaksudkan, yaitu:

- a) Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian.

²¹Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, KUHPdt)*, h. 87.

- b) Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian.
 - c) Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari.
 - d) Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.²²
- c. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 1) Pencurian dalam bentuk pokok dapat dipidana penjara selama-selamanya 5 (lima) tahun ataupun pidana denda setinggi-tingginya Rp. 900- (Sembilan ratus ribu rupiah).
 - 2) Pencurian ringan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.
 - 3) Pencurian dalam bentuk diperberat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan pasal 363 ayat (2) KUHP dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
 - 4) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun dan dapat bertambah menjadi hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun apabila tindak pidana pencurian dalam bentuk diperberat apabila membuat mati orang atau hukuman mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang yang terluka atau mati, dan perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

²²Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 132.

2. Pencurian menurut Hukum Islam

a. Pengertian dan macam-macam Pencurian menurut Hukum Islam

Mencuri dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Sarikah*. Secara etimologis *sarikah* bermakna mengambil sesuatu yang tersembunyi, dalam istilah ulama fikih mencuri bermakna mengambil sesuatu yang dimiliki oleh orang lain secara diam dan rahasia dari penyimpanan yang terjaga dan rapi dengan maksud untuk dimiliki.²³ Dalam literatur hukum Islam, mencuri dibedakan atas dua bagian, yaitu mencuri ringan dan mencuri berat. Mencuri ringan adalah pengambilan harta dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan mencuri berat adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta, akan tetapi tanpa kerelaanya, disamping terdapat unsur kekerasan.

Sementara itu, secara terminologis definisi *Sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

1) Ali Muhammad Al-Jurnani.

Sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh *dirham* yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanan atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.²⁴

2) Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (Ulama Mazhab Syafi'i)

²³Abdi Wijaya, *Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud)*, h. 164.

²⁴M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 99.

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (Orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah *syara'* adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

3) Wahbah Al-Zuhaili

Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori adalah mencuri-curi informasi dari pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

4) Abdul Qadir Audah

Ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.²⁵

Adapun definisi pencurian menurut Muhammad Abu Syahbah adalah pencurian menurut *syara'* yaitu pengambilan oleh seorang mukalaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *niṣṣḥab* (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa adanya *syubhat* dalam barang yang diambil.²⁶

Pencurian dalam Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

²⁵M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 100.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 82.

1) Pencurian yang hukuman *had*

Pencurian yang hukumannya *had* terbagi dalam dua bagian, yaitu:

- a) Pencurian ringan. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.
- b) Pencurian berat. Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.²⁷

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemiliknya. Sedangkan pencurian berat, pengambilan harta dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tersebut tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan didalamnya.²⁸ Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirabah* atau perampokan, dimasukkannya perampokan kedalam kelompok pencurian, disebabkan dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun karena jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

2) Pencurian dengan hukuman *ta'zir*

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 81.

²⁸Abdi Wijaya, *Penerapan Hukum Pidana Islam menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud)*, h. 165.

- a) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥad*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*. Contoh pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
 - b) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.
- b. Unsur-unsur pencurian dalam Hukum Islam

Adapun unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu:

1) Pengambilan secara diam-diam.

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan.

2) Barang yang diambil berupa harta.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai *mal* (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan *mal*, seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum *tamyiz* maka pencuri tidak dikenai hukuman *ḥad*. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum *tamyiz* bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman *ḥad*.²⁹

Dalam kaitannya dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukum potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 83.

- a) Barang yang dicuri harus berupa *malmutaqawwin* yaitu barang yang bernilai menurut *syara'*;
 - b) Barang tersebut harus barang yang bergerak;
 - c) Barang tersebut tersimpan ditempat simpanannya;
 - d) Barang tersebut mencapai *niṣḥab* pencurian. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai *niṣḥab* pencurian.³⁰
- 3) Harta tersebut milik orang lain. Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.
- 4) Adanya niat. Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman *ḥad* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.³¹

c. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:

1) Pengganti Kerugian

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 84.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 88.

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman pengganti kerugian. Dengan demikian, menurut mereka, hukuman terhadap tindak pidana pencurian baik itu hukuman potong tangan maupun hukuman pengganti kerugian tidak boleh dilaksanakan secara bersama-sama.³² Alasannya adalah dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 38 hanya menyebutkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian dan tidak menyebutkan hukuman pengganti kerugian.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan hukuman pengganti kerugian dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Alasannya adalah bahwa pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikarenakan sebagai imbalan dari hak manusia.

Sedangkan menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, disamping itu ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.

2) Hukuman Potong Tangan

Hukum potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 38. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak dapat digugurkan, baik

³²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 90.

oleh korban maupun oleh ulul amri, kecuali menurut Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.³³

d. Dasar Sanksi Hukum bagi Pencuri

Allah berfirman didalam al-Qur'an, yaitu QS. al-Maidah/5: 38, yaitu sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ^{٣٨}

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁴

³³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 91.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an yang diungkapkan, juga dapat dilihat hadits Nabi Muhammad s.a.w. diantaranya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.³⁵

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: Seorang pezina tidak akan berzina jika dia berada di dalam keimanan. Seorang pencuri tidak akan mencuri jika dia berada didalam keimanan, yaitu iman yang sempurna”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ النَّبِيضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ.³⁶

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: kiranya Allah mengutuk orang yang mencuri sebiji telur, tangannya dipotong, dan mencuri seutas tali, dan tangannya dipotong”.

e. Syarat Hukum Potong Tangan

Seorang pencuri dikenakan *had* potong tangan kalau syarat-syarat syar'iyah yang tercantum dalam nash-nash *syara'* telah terpenuhi³⁷, yaitu:

- 1) Perbuatannya telah termasuk ke dalam definisi pencurian, yaitu mengambil barang dengan cara sembunyi-sembunyi.
- 2) Harta yang dicuri mencapai *niṣṣab*, dari Aisyah r.a, ia berkata: “Rasulullah s.a.w. memotong tangan pencuri pada (pencurian) $\frac{1}{4}$ *dinar* atau lebih”. Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah s.a.w. bersabda: “potonglah tangan

³⁵Al- Imām al-Buḥārī, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī* (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), h. 277.

³⁶Al- Imām al-Buḥārī, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, h. 277.

³⁷M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, h. 250.

pencuri pada $\frac{1}{4}$ *dinar*, dan janganlah kalian memotong tangan pencuri (karena mencuri) kurang dari itu”. Jadi 1 *niṣḥab* sama dengan $\frac{1}{4}$ *dinar*. Kadar itu bisa dikonversikan kedalam emas perak, atau uang kertas.

- 3) Harta yang dicuri berupa harta yang terjaga, yang diizinkan oleh *syara'* (Allah) untuk dimiliki.
- 4) Pada saat itu mencuri dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan. Jadi jika seseorang mencuri tatkala pintu terbuka, maka ia tidak dipotong tangannya.
- 5) Harta yang dicuri bukan harta *syubhat*, ditinjau dari sisi bahwa seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, atau ia berhak mengambil barang tersebut. Ibnu Mas-ud bertanya kepada Rasulullah, tentang orang yang mencuri harta *baitul mal*. Rasulullah s.a.w. menjawab, “biarkanlah ia, tidak seorang pun kecuali ia memiliki hak terhadap harta tersebut (harta *baitul mal*).” Dari Sya’biy dari Ali r.a, bahwa beliau pernah berkata, “tidak ada potong tangan bagi orang yang mencuri harta *baitul mal*”. Harta yang kedudukannya seperti harta *baitul mal*, merupakan harta milik umum, oleh karena itu didalam harta tersebut terdapat *syubhat*. Karena itu apabila harta yang mengandung *syubhat* kepemilikan, tidak dikenakan potong tangan. Sebab *ḥudud* bertolak oleh adanya *syubhat*.
- 6) Pencurian telah baligh, berakal dan terikat dengan hukum-hukum Islam. Jika pncuriannya masih anak-anak maka tidak dikenai *ḥad* potong tangan sebagaimana sabda Rasulullah. “Diangkat pena dari tiga orang (yaitu) orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak hingga baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.”

- 7) Ditetapkannya berdasarkan pengakuan pencuri, atau dengan saksi yang adil. Pengakuan harus dinyatakan dengan pernyataan. Artinya pencuri telah mengakui harta yang dicurinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umayyah al-Makhzumi, berkata. “bahwa Rasulullah s.a.w. menerima laporan bahwa seseorang mencuri, akan tetapi barang yang dicuri tidak bisa ditemukan. Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada orang tersebut, “Ah aku kira dia tidak mencuri! Namun laki-laki itu (yang dituduh mencuri) berkata “Benar!” ia menjawab hingga tiga kali. Rasulullah s.a.w. bersabda, potong tangannya!”.

Adapula hukuman *ḥad* potong tangan diterapkan setelah syarat-syarat berikut terpenuhi³⁸, yaitu:

- 1) Orang yang telah melakukan pencurian itu harus sehat pikiran.
- 2) Dia telah dewasa.
- 3) Tidak dipaksa melakukan pencurian.
- 4) Tidak dalam keadaan lapar saat melakukan pencurian itu.

Barang yang dicuri itu pun harus memenuhi syarat berikut sebelum hukuman potong tangan dijalankan:

- 1) Harus mencapai *niṣḥab*;
- 2) Bernilai;
- 3) Tersimpan rapi;
- 4) Dimiliki oleh seseorang.

³⁸Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Edisi ke-I(Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 77.

Syarat lain terkait dengan hukum potong tangan, yaitu Barang yang dicuri itu sedikitnya sampai satu *niṣḥab* (kira-kira seberat 93,6 gram emas), dan barang itu diambil dari tempat penyimpanannya. Barang itu pun bukan kepunyaan si pencuri, dan tidak ada jalan yang menyatakan bahwa ia berhak atas barang itu.

Oleh karena itu, orang yang mencuri harta bapak tidaklah dipotong tangannya begitu juga sebaliknya. Demikian pula bila salah seorang suami istri mencuri harta yang lain, orang miskin yang mencuri dari *baitul mal*, dan sebagainya, tidak dipotong tangan. Dan apabila telah nyata ia mencuri dengan ada saksi atau mengaku sendiri, selain tangannya wajib dipotong, ia pun wajib mengembalikan harta yang dicurinya itu, atau menggantinya kalau barang itu tidak ada lagi ditangannya.³⁹

f. Alat Bukti Pencurian

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut Hukum Islam, yaitu:

- 1) Saksi, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi.
- 2) Pengakuan, dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.
- 3) Sumpah, dikalangan Mazhab Syafi'i, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
- 4) *Qarinah* (Petunjuk).⁴⁰

³⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 441.

⁴⁰A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 80.

g. Hal-hal yang Mengugurkan Hukuman

Hukuman potong tangan dapat gugur karena hal-hal berikut, yaitu:

- 1) Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau tidak mempercayai para saksi. Ini menurut Imam Abu Hanifah, tetapi ulama yang lain tidak demikian.
- 2) Karena adanya pengampuan dari pihak korban, tetapi pendapat ini hanya dikemukakan oleh Syi'ah Zaidiyah.
- 3) Karena pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku apabila pembuktiannya hanya dengan pengakuan.
- 4) Karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan. Pendapat ini hanya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.
- 5) Karena pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya keputusan pengadilan.
- 6) Karena pencuri tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya.⁴¹

h. Hikmah/ Tujuan Hukuman Bagi Pencuri

Mengambil hak orang lain berarti merugikan sepihak. Ketentuan potong tangan bagi para pencuri, menunjukkan bahwa pencuri yang dikenai sanksi hukum potong tangan adalah pencuri yang profesional, bukan pencuri iseng, atau bukan karena keterpaksaan. Sanksi potong tangan atas hukuman bagi pencuri bertujuan antara lain, sebagai berikut:

- 1) Tindakan preventif yaitu menakut-nakuti, agar tidak terjadi pencurian, mengingat hukumannya berat.

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 92.

- 2) Membuat para pencuri timbul rasa jera, sehingga ia tidak melakukan untuk kali berikutnya.
- 3) Menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain.
- 4) Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat.
- 5) Tidak berlaku hukum potong tangan terhadap pencuri yang melakukan tindak pidana pada musim paceklik, memberikan arahan agar para orang kaya melihat kondisi masyarakat, sehingga tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dengan demikian, kecemburuan sosial, yaitu penumpukan harta pada orang-orang tertentu dapat dihindari.⁴²

C. *Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian*

Tindak Pidana pencurian yang dilakukan seseorang tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan kenakalan termasuk pencurian. Faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan yang dapat merugikan orang lain, diantaranya dorongan tabiat manusia yang cenderung melakukan perbuatan itu merugikan orang lain. Keanekaragaman faktor terjadinya kejahatan itu disebabkan karena luasnya ruang gerak manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.⁴³

Delinkuensi adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti, meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Kemudian sub kebudayaan delinkuensi terbentuk

⁴²Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 119.

⁴³Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, h. 8.

apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara cultural diantara kaum muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan dengan melalui jalan-jalan yang tidak sah.⁴⁴

Secara garis besarnya ada dua macam yaitu:

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi:

- a. Faktor Intelegentia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan bujuk untuk menjadi *delinquent* jahat.
- b. Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan, karena usia dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Di mana usia orang dewasa lebih luas wawasan berpikirnya dibanding anak-anak.
- c. Faktor kelamin. Kenakalan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibandingkan perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalan.
- d. Faktor keturunan artinya faktor yang dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan seringkali mengikuti apa yang biasanya dilakukan orang tuanya (genetik).⁴⁵

⁴⁴Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Bandung: CV. Armico, 1984), h. 30.

⁴⁵Pahrur Rizal, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Curanmor di Wilayah Hukum Polsek Cakranegara", *Skripsi*, (Mataram: Fak. Hukum Universitas Mataram, 2014), h. 7.

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor keluarga. Adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. keluarga artinya dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan ini akan memberikan pengalaman yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku seseorang. Pengaruh utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seseorang adalah pengaruh keluarga. Apabila hubungan orang tua dengan anak tidak berjalan dengan harmonis maka kondisi tersebut dapat membentuk perilaku yang tidak baik.⁴⁶
- b. Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan pada anak.
- c. Faktor pergaulan. Seseorang menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku moral, sehingga sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Seseorang akan menjadi nakal akibat dari transformasi

⁴⁶Pahrur Rizal, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Curanmor di Wilayah Hukum Polsek Cakranegara", *Skripsi*, h. 8.

psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

- d. Pengaruh mas media. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa seseorang jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.⁴⁷
- e. Faktor ekonomi artinya kondisi perekonomian secara mikro mengalami suatu perkembangan yang signifikan. Banyaknya pengangguran turut serta ambil bagian dalam terjadinya berbagai macam kejahatan termasuk pencurian motor. Faktor ekonomi memang memiliki pengaruh timbulnya sebuah perilaku menyeleweng dan menyimpang daya minat konsumtif. Akibatnya seseorang memiliki keinginan untuk memiliki suatu barang atau uang sebanyak-banyaknya, tanpa peduli lagi pada tata nilai (haram atau halal) bukan lagi menjadi sebuah ukuran.⁴⁸ Apalagi kalau sebuah kemiskinan itu telah menghimpit kehidupan seseorang, maka lambat laun kondisi itu akan memaksa berbuat suatu perbuatan tercela.
- f. Faktor objek sasaran, faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung akan timbulnya kejahatan curanmor. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor seringkali terjadi bukan karena ada niat terlebih dahulu atau perencanaan yang matang untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi kejahatan pencurian tersebut seringkali timbul karena kesempatan terhadap objek yang mendukung, artinya selain adanya kesempatan dalam melakukan kejahatan namun objek yang jadi sasaran pencurian itu sangat mudah untuk dicuri seperti halnya sepeda motor.

⁴⁷Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 25.

⁴⁸Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, h. 9.

g. Faktor Pendidikan Agama

Faktor yang juga ikut menentukan perilaku jahat adalah erosi pemahaman keagamaan. Karena, agama merupakan faktor utama yang berfungsi untuk menentukan tingkah laku manusia sesuai atau tidaknya dengan nilai-nilai keagamaan. Sebaliknya jika agama itu tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, maka agama itu tidak mempunyai arti sama sekali, dalam pengertian lain imannya kosong. Maka seseorang akan mudah untuk berkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, karena pemahaman keagamaannya kurang baik.

Kurangnya Iman cenderung membuat seseorang terjerumus pada tindakan penyelewengan, tapi seseorang yang pengetahuannya, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai ajaran agamanya kuat cenderung tidak berbuat jahat, apalagi yang berhubungan dengan pelanggaran moral. Hanya dengan agama seseorang akan dapat menahan diri terhadap setiap bentuk perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Untuk itu agama merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia yang menjadi kebutuhan spiritual.⁴⁹ Norma yang terdapat didalamnya merupakan norma ketuhanan yang selalu mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Karena sesuatu yang telah digariskan agama itu senantiasa baik dan membimbing ke arah jalan yang benar.

Sedangkan menurut Kartini Kartono⁵⁰ mengatakan kejahatan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu *kelas defektif secara social*, dan mempunyai sebab

⁴⁹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I*, h. 10.

⁵⁰Kartini Katono, *Patologi Sosial II* (Cet. II; Jakarta: Rajawali, 1992), h. 25.

musabab yang majemuk, jadi sifatnya multi-kausal. Para sarjana menggolongkannya menurut beberapa teori, sebagai berikut:

1. Teori Biologis yaitu tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir.
2. Teori Psikogenetis (Psikologis dan Psikiatris) adalah teori yang menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain ciri intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, intensifikasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang tinggi, dan kecenderungan psikopatologis.⁵¹
3. Teori Sosiogenis. Para sarjana berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Maka faktor-faktor kultur dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu ditengah masyarakat dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.⁵²
4. Teori subkultural delinkuensi. Menurut Teori ini, seorang anak remaja melakukan suatu kejahatan disebabkan oleh:
 - a. Bertambahnya dengan cepat jumlah kejahatan, dan meningkatnya kualitas kekerasan serta kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki subkultural delinkuen.

⁵¹Kartini Katono, *Patologi Sosial II*, h. 26.

⁵²Kartini Katono, *Patologi Sosial II*, h. 28.

- b. Meningkatnya jumlah kriminalitas mengakibatkan sangat besarnya kerugian dan kerusakan secara universal, terutama terdapat di Negara-negara industri yang sudah maju, disebabkan oleh meluasnya kejahatan anak-anak remaja.⁵³

⁵³Kartini Katono, *Patologi Sosial II*, h. 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. “Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu”. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud tercantum dalam metode ilmiah.” Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Adapun jenis dan lokasi Penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan jenis penelitian Sosio Yuridis. Sosio Yuridis merupakan suatu penelitian Hukum yang secara analitis dan empiris yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kota Makassar yang difokuskan di:

- a) Polres Makassar,
- b) Kejaksaan Negeri Makassar,
- c) Pengadilan Negeri Makassar, dan

d) Tokoh masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif lapangan, penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Kriminologi

Pendekatan Kriminologi adalah suatu pendekatan penelitian yang berdasarkan pada sebab-musabab atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Pencurian.

2. Pendekatan Sosio Yuridis

Pendekatan yang mengarah kepada identitas (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (jelas, tegas diatur) didalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

3. Pendekatan normatif Syar'i

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan hadits serta pendapat-pendapat ulama.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer:

Field research atau penelitian lapangan yang secara langsung turun ke lapangan guna memperoleh data yang ada di kota Makassar, yakni data yang akan diperoleh dari:

- a) Masyarakat
- b) Polres Makassar
- c) Kejaksaan Negeri Makassar
- d) Pengadilan Makassar.

2. Data Sekunder:

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan atau *Library research*. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *library reseacrh*, dengan jalan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah, dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari *Library Research* yang dijadikan sebagai referensi seperti jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku atau makalah, surat kabar, majalah dan bahan bacaan lainnya.

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (informan) yang membicarakan jawaban atas pertanyaan itu.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” sejauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis yaitu Alat yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. *Camera*, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan pembicaraan atau mewawancarai informan.
4. *Tape recorder*, alat ini berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Klasifikasi data* adalah mengolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
- b. *Reduksi data* adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- c. *Koding data* adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
- d. *Editing data* adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Analisis data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan

catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, kemudian ditabulasi dengan tabel frekuensi dengan rumus statistik sederhana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pencurian Motor di Kota Makassar

Adapun Data Pencurian Motor yang diperoleh dari berbagai lokasi yang terdapat di wilayah kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Data Polrestabes Makassar

Data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar, yakni:

Tabel 1
Data Pencurian Motor di Polrestabes Makassar dirinci menurut tahun 2010-2014

No.	Tahun	Dilaporkan	Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar
1.	2010	698	122
2.	2011	865	89
3.	2012	1288	145
4.	2013	1289	146
5.	2014	1440	149
Jumlah		4282	651

Sumber Data: Data Poretabs Kota Makassar, tahun 2016.

Data ini diperoleh di Polrestabes Makassar, dimana jumlah pencurian motor yang dilaporkan dari jajaran sektor-sektor yang ada di Kota Makassar tiap tahunnya itu semakin meningkat dihitung mulai dari tahun 2010-2014. Jumlah pencurian motor yang diselesaikan dan dilimpah ke Kejaksaan pun semakin meningkat. Namun, pada

tahun 2011 jumlah pencurian motor diselesaikan itu agak menurun dari tahun-tahun berikutnya.

Dan adapun lokasi di Kota Makassar yang marak terjadi pencurian motor yaitu bagian Polsek Panakkukang yakni Mall Panakkukang dan sekitarnya. Menurut keterangan Aiptu Awaluddin bagian Kaurmin Satreskrim Polrestabes Makassar Mengatakan bahwa:

“Alasan dibagian Mall panakkukang dan sekitarnya sering terjadi pencurian motor karena lokasi tersebut adalah pusat perbelanjaan, pusat bisnis dan berada di tengah kota, yang di mana pengunjungnya itu dari berbagai tempat. Selain itu, lokasi tersebut banyak yang memarkir kendaraannya di sembarang tempat tanpa adanya tukang parkir yang dapat dipercaya, sehingga hal tersebut memberi peluang terhadap seseorang untuk melakukan aksinya.”¹

Selanjutnya, menurut keterangan Brigpol Adi Jaya B. Bagian Subagkum mengatakan bahwa:

“lokasi yang sering pula terjadi pencurian motor yaitu di sektor Tamalanrea, alasannya karena lokasi ini tepat pada pusat kampus UNHAS yang di mana antara pelaku dan korban itu tidak ada perbedaan dan tidak diketahui mana yang mahasiswa dan mana yang bukan mahasiswa. Selain itu, pelaku pencurian itu sebaya dengan mahasiswa, sehingga ia dengan mudahnya melakukan aksinya, apalagi parkir di lokasi kampus tersebut tidak adanya tukang parkir, tidak adanya alat pengintai seperti CCTV dan satuan keamanan (Satpam) hanya berjaga di pintu masuk ataupun pintu keluar dari kampus tersebut.”²

Adapun tempat, waktu dan modus kejadian tindak pidana pencurian motor adalah sebagai berikut:

¹Awaluddin (35 Tahun), Kaurmin Satreskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Januari 2016.

²Adi Jaya B (28 Tahun), Ba. Subbagkum Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Januari 2016.

Tabel 1.1**Hari Kejadian Tindak Pidana Pencurian Motor**

No.	Hari	Jumlah
1.	Senin	141
2.	Selasa	98
3.	Rabu	99
4.	Kamis	92
5.	Jumat	124
6.	Sabtu	129
7.	Minggu	105

Sumber Data: Data Polrestabes Kota Makassar, tahun 2016.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana pencurian yang paling banyak terjadi itu pada hari senin, karena pada hari senin merupakan hari kerja atau hari yang di mana semua orang banyak melakukan aktivitas pada hari tersebut. Sehingga semua orang atau semua kalangan beraktivitas diluar dari rumahnya sehingga pada hari itu peluang bagi pelaku pencurian motor sangat besar.

Tabel 1.2**Tanggal Kejadian Tindak Pidana Pencurian Motor**

No.	Tanggal	Jumlah
1.	1-5	199
2.	6-10	155
3.	11-15	137
4.	16-20	129
5.	21-25	114
6.	26-31	91

Sumber Data: Data Polrestabes Kota Makassar, tahun 2016.

Dari data yang diperoleh tanggal kejadian yang paling banyak dijumpai tindak pidana pencurian motor yaitu pada tanggal 1-5, alasannya karena pada awal bulan biasanya kebanyakan orang memiliki kendaraan baru, mungkin karena dipengaruhi oleh awal bulan orang menerima gaji. Selain itu, pada awal bulan kebanyakan dari mereka yang memperbaiki motornya, baik orang tersebut mendikonya, membersihkan dan bahkan banyak yang menggunakan kendaraan baru.

Tabel 1.3

Jam Kejadian Tindak Pidana Pencurian Motor

No.	Jam	Jumlah
1.	00-03	174
2.	04-06	141
3.	07-10	67
4.	11-12	48
5.	13-16	64
6.	17-20	82
7.	21-22	94
8.	23-24	114

Sumber Data: Data Polrestabes Kota Makassar, tahun 2016.

Dari **tebel 1.3** jam kejadian yang banyak terjadi pencurian motor yaitu pada waktu 00-03 karena pada jam itu semua orang telah lengah dan waktu itu adalah waktu istirahat, jadi kurang orang yang melakukan aktivitas sehingga pelaku pencurian motor memiliki kesempatan atau peluang yang sangat besar untuk melaksanakan aksinya. Menurut keterangan RY, yaitu:

“pada saat melakukan aksinya itu pada malam hari sekitar jam 01 lewat karena menurutnya dalam melakukan aksinya sangat minim orang yang dapat melihatnya dan sangat minim orang yang dapat membantu korban jika aksinya di ketahui.”³ Sehingga pada malam hari sekitar pukul 00.00-03.00 sangatlah besar peluang pelaku pencurian motor untuk melakukan aksinya.

Tabel 1.4

Modus dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor

No.	Modus	Jumlah
1.	Rusak Kunci	655
2.	Dorong	127

Sumber Data: Data Polrestabes Kota Makassar, tahun 2016.

Dari **Tabel 1.4** Modus dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian yang banyak terjadi adalah modus Rusak kunci yaitu sekitar 655 kasus. Menurut keterangan Brigpol Adi Jaya B. Bagian Subbagkum Polrestabes Makassar mengatakan bahwa perusakan kunci yang dilakukan pelaku adalah pencurian motor yaitu menggunakan Kunci T.⁴ Di mana kunci T adalah kunci yang berbentuk Huruf T, di mana ujung dari salah satu sudut itu sangat rungcing atau tajam yang digunakan untuk dimasukkan pada lubang kunci motor dengan merusakkan lubang kunci motor tersebut.

Menurut keterangan MSP pada saat dia melakukan aksinya itu menggunakan kunci T yaitu dengan merusakkan lubang kunci tersebut kemudian menyambungkan stop kontak motor tersebut untuk menyalakan motor tersebut kemudian membawa lari motor tersebut.⁵

³RY (16 Tahun), Narapidana Pencurian Motor, *Wawancara*, Lapas Kelas 1 Makassar, 22 Januari 2016.

⁴Adi Jaya B. (28 Tahun), Ba. Subbagkum Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Januari 2016.

⁵MSP (16 Tahun), Narapidana Pencurian Motor, *Wawancara*, Lapas Kelas 1 Makassar, 27 Januari 2016.

2. Data Kejaksaan Negeri Makassar

Adapun data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Makassar adalah:

Tabel 2

**Data Pencurian Motor di Kejaksaan Negeri Makassar dirinci menurut tahun
2010-2014**

No.	Tahun	Diterima	Di Limpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar
1.	2010	122	103
2.	2011	89	101
3.	2012	145	135
4.	2013	146	148
5.	2014	149	151
Jumlah		651	638

Sumber Data: Data Kejaksaan Negeri Makassar, tahun 2016.

Data ini diperoleh dari Kejaksaan Negeri Makassar dihitung mulai dari tahun 2010-2014, dimana jumlah kasus pencurian motor yang diterima setiap tahunnya meningkat. Namun, pada tahun 2011 jumlah pencurian yang diterima di Kejaksaan Negeri Makassar menurun dari tahun sebelumnya kemudian meningkat lagi hingga tahun 2014. Dan kasus yang dilimpah ke Pengadilan Negeri juga semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2011 kasus pencurian yang dilimpah ke Pengadilan Negeri Makassar menurun dari tahun sebelumnya kemudian meningkat lagi hingga tahun 2014.

Menurut A. Suci Rahmadani mengatakan bahwa:

“Jumlah pencurian motor setiap tahunnya meningkat karena kurangnya efek jera bagi pelaku pencurian motor itu, dan kebanyakan dari mereka yang

Recidivis yaitu telah melakukan kejahatan sebelumnya kemudian mengulangi kembali perbuatannya. Selain itu, sanksi yang diberikan untuk hukuman pencurian motor paling lama 1 tahun jika perilakunya *recidivis*, namun jika perbuatannya baru pertama kali maka dikenakan sanksi 6 atau sekitar 7 bulan, dan ini tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku pencurian.”⁶

3. Data Pengadilan Negeri Makassar

Adapula data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar, yaitu:

Tabel 3

**Data Pencurian Motor di Pengadilan Negeri Makassar dirinci menurut tahun
2010-2014**

No.	Tahun	Diterima	Diputus
1.	2010	103	107
2.	2011	101	101
3.	2012	135	125
4.	2013	148	135
5.	2014	151	156
Jumlah		638	624

Sumber Data: Data Pengadilan Negeri Makassar. Tahun 2016.

Data ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 2010 jumlah kasus pencurian motor yang diterima di Pengadilan Negeri sebanyak 103 kasus namun pada tahun 2010 jumlah kasus yang diputus meningkat dari jumlah kasus yang diterima karena ada tambahan kasus dari tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011 jumlah kasus yang diterima sebanyak 101 kasus dan sama dengan jumlah kasus pencurian motor yang diputus. Sedangkan pada tahun 2012-2013 jumlah kasus yang diterima lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus yang diputus di Pengadilan

⁶A. Suci Rahmadani (30 Tahun), Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 Januari 2016.

Negeri Makassar. Namun, pada tahun 2014 jumlah perkara pencurian motor yang diterima sebanyak 151 kasus sedangkan jumlah perkara yang diputus sebanyak 156 kasus. Karena ada tambahan perkara sebanyak 5 kasus dari tahun sebelumnya.

Tabel 4

**Data Pencurian Motor di Pengadilan Negeri Makassar dirinci menurut
Putusnya Perkara**

No.	Tahun	Putus	
		Bebas	Terbukti
1.	2010	-	107
2.	2011	-	101
3.	2012	-	125
4.	2013	1	134
5.	2014	-	156
Jumlah		1	632

Sumber Data: Data Pengadilan Negeri Makassar, tahun 2016.

Data ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar dihitung mulai dari tahun 2010-2014, dimana jumlah Kasus pencurian motor setiap tahunnya yang diputus terbukti itu meningkat, dari tahun 2010 jumlah kasus pencurian motor yang diputus yaitu 107 kasus hingga tahun 2014 kasus yang diputus yaitu 156 kasus. Namun, adapula 1 kasus yang diputus bebas yaitu pada tahun 2013. Menurut keterangan Hakim Suparman Nyompa selaku Hakim ketua pada kasus pencurian motor yang ditangani mengatakan bahwa:

“Saya telah menangani kasus pencurian motor yang diakhiri dengan perdamaian karena orang tua dari pelaku curanmor itu adalah keluarga yang

berada dan mampu menggantikan kembali motor yang telah dicuri oleh anaknya, “⁷sehingga ia diputus bebas oleh Hakim.

Tabel 5

Data Pencurian Motor di Pengadilan Negeri Makassar dirinci menurut pasal yang dilanggar

No.	Pasal	Tahun					Total
		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	362	23	25	31	33	36	148
2.	363	46	50	56	62	71	285
4.	365	38	35	38	39	49	199
Jumlah		107	110	125	134	156	632

Sumber Data: Data Pengadilan Negeri Makassar, tahun 2016.

Data ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar yang dihitung mulai dari tahun 2010-2014. Di mana dapat dilihat dari pasal yang dilanggar, ternyata pasal yang paling banyak dilanggar bagi pelaku pencurian motor adalah pasal 363 KUHP yaitu berjumlah 285 kasus pencurian motor, kemudian pasal 365 KUHP berjumlah 199 kasus, sedangkan untuk pasal 362 KUHP jumlah kasus pencurian yang terjadi sebanyak 148 kasus. Adapun bunyi pasal dari 362, 363, dan 365 KUHP yaitu:

Pasal 362 KUHP, yaitu:

Barang Siapa yang mengambil suatu barang, baik sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan Hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

⁷Suparman Nyompa (52 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Januari 2016.

Pasal 363 KUHP, yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(2) Jika pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 365 KUHP, yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat;

(3) Jika perbuatan ini mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pul oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.⁸

⁸Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, KUHPdt)*, h. 85.

B. *Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Motor di Kota Makassar*

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya Pencurian Motor di Kota Makassar yaitu adanya faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu Faktor individual, Sedangkan Faktor Eksternal terdiri dari: 1) faktor Ekonomi, 2) faktor Keluarga, 3) Faktor Pendidikan. 4) faktor Lingkungan/ pergaulan, 5) faktor kelalaian masyarakat, 6) faktor adanya niat dan kesempatan, dan 7) Faktor Pendidikan Agama.

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari luar. Yang termasuk kedalam Faktor Internal adalah Faktor Individual yaitu kondisi psikologis erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitikberatkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang tersebut. Menurut keterangan IS mengatakan Bahwa: “saya khilaf melakukan pencurian motor”⁹. Faktor senang-senang. Faktor senang-senang juga termasuk ke dalam faktor individual karena Menurut keterangan A. Suci Rahmadani mengatakan bahwa:

“terkadang penyebab seseorang melakukan pencurian motor karena memang hanya untuk bersenang-senang, bukan karena faktor ekonominya karena dia orang susah tapi karena hasil dari pencurian motor tersebut digunakan untuk bersenang-senang.”¹⁰

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Faktor Eksternal terdiri dari:

⁹IS (17 Tahun), Narapidana Pencurian Motor, *Wawancara*, Lapas Kelas 1 Makassar, 27 Januari 2016.

¹⁰A. Suci Rahmadani (30 Tahun), Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 Januari 2016.

a. Faktor Ekonomi.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polrestabes Makassar dengan Aiptu Awaluddin, umumnya pelaku kejahatan di Kota Makassar yaitu mereka yang taraf ekonomi rendah bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini juga disebabkan karena kurang tersedianya lapangan kerja yang dapat meningkatkan taraf perekonomian yang lemah pada masyarakat.¹¹

Masalah ekonomi sangat berpengaruh terhadap pola hidup seseorang baik anak-anak maupun orang dewasa. Menurut Keterangan Suparman Nyompa mengatakan bahwa:

“biasanya seseorang akan melakukan kejahatan demi mendapatkan uang, di mana tujuannya itu berbeda-beda. Biasanya anak mendapatkan uang hasil pencurian motor itu digunakan untuk bersenang-senang, sedangkan untuk orang dewasa uang hasil curian motor digunakan demi kepentingan keluarganya.”¹²

Dan Menurut keterangan RY mengatakan bahwa:

¹¹Awaluddin (35 Tahun), Kaurmin Satreskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Januari 2016.

¹²Suparman Nyompa (52 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Januari 2016.

“Motor itu nah jual temanku terus uang hasil dari curian motor itu saya pake untuk senang-senang ji terus saya pake jalan-jalan juga sama teman-temannya temanku”.¹³

Sedangkan menurut keterangan MSP Mengatakan Bahwa:

“Motor itu saya pake karena tidak ada motorku, setelah itu rencanaka mau jual itu motor terus hasil jualan itu motor mauka belikan baju, celana dan topi”.¹⁴

Melihat keterangan yang dipaparkan oleh kedua Narapidana tersebut dapat diartikan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang.

Namun, menurut keterangan A. Suci Rahmadani mengatakan bahwa “faktor ekonomi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan dalam melakukan penuntutan, tetapi yang dipertimbangkan adalah perbuatan yang mereka dilakukan. Seberapa besar perbuatan yang dilakukan seseorang maka sesuai dengan sanksi yang dikenakan padanya”.¹⁵ Jadi sanksi yang didapatkan oleh seseorang adalah sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan.

b. Faktor keluarga artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan berinteraksi dengan lingkungan.

Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan ini akan memberikan pengalaman yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku seseorang. Menurut keterangan Brigpol Adi Jaya B. Menerangkan bahwa:

“Keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak, karena jika anak tersebut lebih dekat dengan orang tuanya maka anak tersebut tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan luar karena pengaruh yang sangat cepat terhadap anak yaitu menurut psikologi seseorang dibentuk dimana seseorang lama

¹³RY (16 Tahun), Narapidana Pencurian Motor, *Wawancara*, Lapas Kelas 1 Makassar, 27 Januari 2016.

¹⁴MSP (16 Tahun), Narapidana Pencurian Motor, *Wawancara*, Lapas Kelas 1 Makassar, 27 Januari 2016.

¹⁵A. Suci Rahmadani (30 Tahun), Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 Januari 2016.

menetap. Artinya bahwa jika anak tersebut lebih lama berada di lingkungan keluarganya maka pengaruh yang ia ikuti adalah lingkungan keluarganya, namun jika anak tersebut lebih lama di lingkungan luar atau lingkungan teman-temannya maka akan berpengaruh pada lingkungan teman-temannya tersebut. “Dan banyak orang tua mengatakan bahwa anak ku baik ji, bagus ji, ternyata diluar anaknya seorang Begal.”¹⁶

Misalnya anak berada di lingkungan keluarganya selama 2 jam kemudian berada di lingkungan teman-temannya 4-5 jam, maka pengaruh dari teman-temannya lebih cenderung ia ikuti. Jadi jika keluarga dapat lebih banyak berperan terhadap anak maka tingkah laku anak mengikuti tingkah laku keluarganya. Selain itu, karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya, sehingga anak tidak terurus maka pelariannya ke pergaulan. Apalagi orang tuanya yang super sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anaknya.”

c. Faktor Pendidikan Sekolah

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), karena pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para pelaku, dua diantara mereka Cuma tamatan SD dan mereka hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Dan menurut keterangan Suparman Nyompa mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor penyebab seseorang melakukan pencurian motor karena kegagalan pendidikan baik itu pendidikan di Rumah dalam Keluarga maupun pendidikan disekolah. Dan biasanya itu kalau anak-anak mereka

¹⁶Adi Jaya B. (28 Tahun), Ba. Subagkum Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar 21 Januari 2016.

putus sekolah dan jika mereka yang orang dewasa seperti Mahasiswa mereka itu gagal pendidikan.”¹⁷

Dan pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, baik itu pendidikan yang ada di sekolah maupun pendidikan yang ada dalam keluarga karena Rendahnya tingkat pendidikan akan mempermudah terjadinya kejahatan seperti halnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

d. Faktor Lingkungan atau pergaulan.

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan, faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Dan mengingat perkataan dari orang tua mengatakan bahwa “Narekko Tillolang Dicowe maka Tillolang Tokki Matu, Tafi narekko Fasempajang Dicowe maka Fasempajang Tokki Matu”, (Jika pencuri diikuti maka pencuriki juga, tapi jika orang yang rajin shalat diikuti maka kita juga ikut rajin shalat).

Faktor pergaulan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku seseorang. karena Menurut MSP mengatakan bahwa:

“Nah ajakka temanku, terus ikut ma juga, tapi temanku yang pergi rusakki kunci motornya itu orang terus saya jaga-jaga ka, ku awasi temanku supaya tidak ada orang yang liat-liatika”¹⁸.

¹⁷Suparman Nyompa (52 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Januari 2016.

Dan menurut keterangan RY mengatakan bahwa:

“Pertamanya Na ajakka temanku terus penasaranka juga jadi saya coba-coba mi, tapi sempat jeka takut-takut nanti didapatika tapi nah bilang temanku tidak ji ikut meko saja, jadi saya ikuti mi, terus yang kedua kalinya na ajakka lagi temanku tapi bilangka ayo mi tapi terakhir kalinya mi ini nah, na bilang temanku iya terakhirmi, sudahnya itu tidak pernah ma lagi mencuri.”¹⁹

Dan menurut keterangan IS mengatakan bahwa “Na ajakka temanku jadi ikut ma juga”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku pencurian motor mereka semua mengatakan bahwa mereka hanya diajak oleh teman mereka dan mereka hanya mengikutinya. Menurut keterangan Suparman Nyompa mengatakan bahwa:

“Biasanya anak dipengaruhi oleh temannya untuk melakukan suatu kejahatan (mencuri), dan anak tersebut mampu dari segi ekonominya tapi karena faktor lingkungan sehingga mereka larut dalam sebuah kejahatan. Contohnya saja ada sebuah kasus yang pernah saya tangani orang tua dari anak itu berasal dari keluarga yang mampu namun karena dia tidak mengetahui pergaulan dan tingkah laku anaknya, maka dia bersedia untuk menggantikan motor korban tersebut, dan ini dapat menghasilkan perdamaian antara si pelaku dengan korban pencurian.”²¹

Dan menurut keterangan Aiptu Awaluddin mengatakan bahwa:

“Ada anak yang melakukan pencurian motor karena adanya paksaan dari temannya, “kamu tidak boleh ikut gabung dengan kami jika kamu tidak ikut kami dalam melakukan pencurian ini”.²² Karena adanya paksaan dari teman pergaulannya maka seseorang juga akan mengikuti tengkah laku orang tersebut.

¹⁸MSP (16 Tahun), Narapidana Pencurian Motor, *Wawancara*, Lapas Kelas 1 Makassar, 27 Januari 2016.

¹⁹RY (16 Tahun), Narapidana Pencurian Motor, *Wawancara*, Lapas Kelas 1 Makassar, 27 Januari 2016.

²⁰IS (17 Tahun), Narapidana Pencurian Motor, *Wawancara*., Lapas Kelas 1 Makassar, 27 Januari 2016.

²¹Suparman Nyompa (52 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Januari 2016.

²²Awaluddin (35 Tahun), Kaurmin Satreskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Januari 2016.

Faktor Penadah juga termasuk ke dalam faktor lingkungan. Dimana Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menimbulkan pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat disemua kalangan. Kelompok ini sadar tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari perdagangan barang-barang hasil curian tersebut. Secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku-pelaku profesional dari pada tindak pidana terhadap barang-barang hasil curian yang merupakan mata rantai daripada seluruh kegiatan didalam rangkaian pencurian barang-barang curian tersebut. Maraknya penadah akan dapat mempengaruhi para pelaku pencurian motor untuk terus melakukan kejahatan karena pelaku pencurian motor itu tahu akan mempermudah dalam memperjual-belikan barang curiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim suparman Nyompa mengatakan bahwa:

“Karena adanya penadah atau pembeli hasil curian motor tersebut maka marak terjadi pencurian motor, karena pikir saja jika tidak adanya penadah maka mereka tidak tahu akan menjual hasil curian motor mereka itu ke mana, namun karena adanya penadah yang siap membeli meskipun cuma kap-kap atau alat perabot dari motor tersebut dia tetap membelinya.”²³

e. Faktor Kelalaian Masyarakat

Kelalaian Masyarakat ini juga merupakan salah satu faktor peluang terhadap seseorang untuk melakukan pencurian motor. Biasanya pengendara lalai dalam memberikan keamanan terhadap kendaraannya. Kasus pencurian motor menjadi atensi pihak kepolisian karena banyaknya laporan yang diajukan oleh masyarakat. Banyak ditemukan motor yang terparkir bebas didepan rumah tanpa pengawasan ada

²³Suparman Nyompa (52 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Januari 2016.

yang tidak kunci leher bahkan yang paling cerobohnya terkadang pengendara lupa mengambil kuncinya yang tergantung di kontak motornya. Faktor yang biasanya menimbulkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan karena adanya peluang atau kesempatan untuk beraksi.

Menurut keterangan A. Suci Rahmadani mengatakan bahwa:

“Sebenarnya masyarakat sendiri yang beri kesempatan pada pelaku karena terkadang pengendara itu tidak memperhatikan kenderaannya, mereka terkadang lupa kunci motornya, terus terkadang juga mereka memikirkan uang parkir yang mahal jika diparkir didalam ruangan seperti di Mall sehingga mereka hanya parkir diluar yang belum tentu pasti keamanannya, dan ternyata apa, malah kerugiannya lebih besar”

f. Faktor adanya Niat dan Kesempatan

Faktor ini sebenarnya adalah faktor utama seseorang melakukan pencurian motor. Karena pencurian akan berjalan dengan lancar jika diberengi dengan NK yaitu Niat dan Kesempatan. Menurut keterangan Ibrahim Palino mengatakan bahwa:

“Faktor utama seseorang melakukan pencurian motor adalah karena adanya niat dan kesempatan, meskipun tidak ada niat sebelumnya namun karena adanya kesempatan maka ini akan memberi peluang kepada seseorang untuk melakukan aksinya. Akan tetapi, jika Cuma ada niat untuk melakukan kejahatan namun karena tidak ada kesempatan mungkin karena ada penjaganya, maka dia tidak dapat melakukan aksinya. Apalagi jika sebelum berangkat sudah ada memang niatnya untuk melakukan kejahatan seperti mencuri motor dan diberangi pula dengan kesempatan yang sangat besar bahkan sudah didepan mata maka dengan mudahnya dia melakukan aksinya.”²⁴ Maka jangan pernah memberikan kesempatan kepada seseorang karena dari kesempatan akan menimbulkan niat.

g. Faktor Pendidikan Agama

Faktor pendidikan Agama juga berpengaruh terhadap moral seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Kasus pencurian kendaraan bermotor seringkali terjadi di

²⁴Ibrahim Palino (54 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Januari 2016.

wilayah Kota Makassar, hal ini terjadi bukan karena minimnya perekonomian pelaku pencurian motor saja, tetapi adanya faham ajaran agama yang masih lemah di dalam lingkungan masyarakat kota. Ajaran agama sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan bermasyarakat. Manusia yang memiliki pengetahuan yang baik tentang agama akan membentuk kepribadian dan keimanan yang baik dalam diri manusia itu. Terwujudnya kepribadian yang baik akan membantu manusia untuk dapat memilih perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Beberapa fakta yang terjadi di Lapas kelas 1 Makassar terkait pelaku pencurian motor yang sudah tertangkap. Rata-rata pelaku pencurian motor itu tidak faham ajaran agama dengan baik, sehingga tidak membentuk keimanan yang kuat dalam kepribadiannya. Ketidakhahaman tentang ajaran agama inilah yang menjadi salah satu potensi besar akan meningkatnya kasus pencurian motor di dalam lingkungan masyarakat.

C. Upaya Pemberantasan Pencurian Motor di Kota Makassar

Adapun upaya Pemberantasan Pencurian Motor di Kota Makassar ada 2 Pandangan, yaitu:

1. Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Motor Menurut Hukum Nasional

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu

masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.²⁵

Menurut H. L. Packer dalam bukunya “The Limits of criminal sanction” menyimpulkan bahwa:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana,
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya,
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan ‘penjamin yang utama/terbaik’ dan suatu ketika merupakan ‘pengancam yang utama’ dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.²⁶

Kebijakan Penanggulangan kejahatan yang ada di Indonesia menggunakan hukum pidana yakni dengan melihat 2 pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Integral antara kebijakan penal dan kebijakan non penal.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana “non penal”. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyentuhan dan pendidikan sosial

²⁵Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), h. 149.

²⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, h. 156.

dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan normal, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus-menerus oleh polisi dan aparat keamanan lain dan sebagainya.²⁷

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dari sudut politik kriminil, kesesluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Karena kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Oleh karena itu suatu kejahatan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan.²⁸ Dan menurut Suparman Nyompa mengatakan bahwa:

“Upaya untuk meminimalisir tindak pidana pencurian motor yaitu dengan cara memberantas atau mengatasi faktor-faktor penyebabnya terlebih dahulu, karena jika faktor penyebabnya dapat dituntaskan maka akan mengurangi pencurian motor.”²⁹

b. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana.

²⁷Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, h. 159.

²⁸Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, h. 160.

²⁹Suparman Nyompa (52 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Januari 2016.

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, kiranya Prof Sudarjo berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalitas harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya, yaitu:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat;
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”;
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.³⁰

Dalam menegakkan hukum pidana, polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan. Adapun mekanisme penanggulangan kejahatan khususnya Polri, yaitu:

a. Penanggulangan kejahatan secara umum

Sesuai dengan hakekat sumber terjadinya kriminalitas, penanggulangan kriminalitas secara umum senantiasa dilakukan melalui upaya preventif dan represif.

³⁰Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, h. 161.

Dan menurut Ibrahim Palino mengatakan bahwa “upaya untuk meminimalisir tindak pidana pencurian motor yaitu dengan menggunakan upaya preventif dan represif”.³¹

Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif Polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara lebih dini pada (*early detection and early warning*) pada lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja. Dan menurut pendapat Aiptu Awaluddin mengatakan bahwa:

“Sebenarnya peran masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kendaraannya yakni simpan ditempat yang aman, kemudian untuk di kampus-kampus gunakan sistem dengan memperlihatkan STNK motor apabila hendak keluar dari kampus.”³²

Selain itu, A. Suci Rahmadani juga menerangkan bahwa:

“Keamanan kendaraan motor kembali pada pengelolaan pada kampus, keamanan kampusnya lebih ditingkatkan karena jika pengamanannya ketat maka tidak ada celah seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, misalnya motornya dikunci baik-baik, helmnya juga di simpan baik-baik kalau perlu simpan didalam sadel motornya, kamanan juga diperketat, dan mungkin bagusya gunakan karcis-karcis untuk pengendara terus kalau misalnya tidak ada karcisnya tidak bisa keluar seperti halnya dengan mall-mall.”³³

Sedangkan menurut Brigpol Adi Jaya B. Mengatakan bahwa:

“Keamanan dalam lingkungan masyarakat harus lebih ditingkatkan yaitu dengan menertibkan kembali Pos kambling atau aktifkan kembali jam malam, tokoh masyarakat harus kembali menjadi seorang pendidikan di kawasan lingkungannya mengawasi masyarakatnya dan warganya terutama orang tua

³¹Ibrahim Palino (54 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Januari 2016.

³²Awaluddin (35 Tahun), Kaurmin Satreskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Januari 2016.

³³A. Suci Rahmadani (30 Tahun), Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 Januari 2016.

yang paling berperan penting jangan sampai orang tua lalai dalam mengawasi anaknya harus mengontrol jumlah keluarganya sudah lengkap atau belum, kemudian juga harus dikontrol terhadap beberapa warnet karena biasanya tempat itu merupakan ajang ngumpul, terus awasi juga tentang apotek karena peredaran obat-obat.”³⁴

b. Penanggulangan Kejahatan oleh Polri

Berdasarkan undang-undang RI Nomor 13 tahun 1961 pasal 2, tugas-tugas Kepolisian Negara adalah:³⁵

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan negara terhadap gangguan didalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan mengusahakan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
- 2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan hukum secara pidana dan lain-lain peraturan negara.
- 3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu perusahaan negara.

Sebagai penyelidik maka polisi berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan

³⁴Adi Jaya B. (28 Tahun), Ba. Subbagkum Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Januari 2106.

³⁵Soerjono Seokanto dan Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor* (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 27.

barang bukti; menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Secara lebih terinci Gergon W. Bawengan³⁶, membagi upaya untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan, sebagai berikut:

- 1) Upaya Pre-entif yaitu Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang, upaya pre-entif bisanya dilakukan dengan cara himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan.
- 2) Upaya Preventif: berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 3) Upaya Represif: Upaya Represif yaitu upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat. Selain itu, aturan hukum positif di dalam KUHP dan Undang-

³⁶Soerjono Seokanto dan Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, h. 28.

Undang diluar KUHP sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, siapa saja yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

2. Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Motor Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana pencurian motor yaitu dengan dikenakan sanksi pencurian yaitu dengan hukuman ganti rugi atau hukuman had potong tangan. Dalam tindak pidana pencurian, para ulama mempermasalahkan ganti rugi dan sanksi.

Menurut Imam Abu Hanifah, ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenai sanksi hukuman *had*, maka baginya tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan masalah sanksi saja. Selain itu, jika pencuri harus membayar ganti rugi, maka seakan-akan harta itu adalah miliknya. Akan tetapi, Mazhab Hanafi pada umumnya berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik masih berada ditangan pencuri maupun telah berpindah ke tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pencuri.

Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar 2 hak, dalam hal ini hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri harus mempertanggungjawabkan akibat dua hak ini, jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Inilah yang disebut dengan prinsip *dhaman* dikalangan ulama.

Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Hanya mereka berbeda pendapat bila harta yang dicuri itu telah tidak ada ditangan pencuri. Adapun dasar hukum potong tangan adalah Firman Allah dalam QS. al-Maidah/5: 38, yaitu:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Hukuman potong tangan ini tidak dapat dimaafkan, jika perkaranya sudah diserahkan dan ditangani oleh Ulul Amri. Karena Ketentuan ini disepakati ulama sebagai dasar bahwa pencurian itu delik biasa, bukan delik aduan.

Berkenaan dengan anggota badan yang dipotong dan batas pemotongannya, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa pada pencurian pertama yang dipotong adalah tangan kanan, pada pencurian kedua yang dipotong adalah kaki kiri, pada pencurian ketiga, yang dipotong adalah tangan kiri, dan pencurian yang keempat adalah kaki kanan. Jika pencuri masih melakukan pencurian kelima kalinya, maka ia dipenjara hingga bertobat. Alasannya, kata *Aydiy* itu adalah isim jamak.

Adapun menurut pendapat Atha, pencuri yang mencuri, pencurian yang pertama dipotong tangannya. Bila mencuri untuk kedua kalinya, maka diberi hukuman *ta’zir*. Alasannya karena dalam ayat tidak ada perintah untuk memotong kaki. Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa pada pencurian pertama dipotong tangan kanannya. Pada pencurian kedua, dipotong tangan kirinya. Pada pencurian ketiga, dikenai hukuman *ta’zir*.³⁷

³⁷A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulani Kejahatan dalam Islam)*, h. 83.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, pada pencurian pertama, pencuri dipotong tangan kanannya. Pada pencurian kedua, dipotong kaki kirinya. Pencurian ketiga dipenjara sampai tobat. Alasannya kata *Aydiyahuma* maksudnya adalah tangan kanannya, sebab Ibn Mas'ud membacanya dengan *faqtha'u aymanahuma*. Oleh karena itu, bacaan ini merupakan tafsiran dari kata *aydiyahuma*. Selain itu, jika dipotong dua tangan dan dua kakinya, maka ia tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tidak dapat makan, berjalan, bersuci, dan mempertahankan diri. Umar dan Ali pun tidak lebih dari sekedar memotong tangan kanan dan kaki kiri pencuri.³⁸

Batas pemotongan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zahiri adalah dari pergelangan tangan ke bawah. Begitu pula bila yang dipotong kakinya, maka batas pemotongannya adalah dari pergelangan kaki. Alasannya adalah batas minimal anggota yang disebut tangan dan kaki adalah telapak tangan atau kaki dengan jari-jarinya. Selain itu, Rasulullah melakukan pemotongan tangan pada pergelangan tangan pencuri.

Bila seorang pencuri melakukan beberapa kali dan baru tertangkap, maka ia hanya dikenai hukuman sekali. Karena pencurian itu merupakan *jarimah hudud* yang berkaitan dengan hak Allah. Padanya, sepenuhnya ditetapkan teori *al-tadakhul*. Demikian juga halnya dengan kasus-kasus lainnya yang berhubungan dengan hak Allah. Sehubungan dengan ini, dipegang kaidah sebagai kaidah sebagai berikut: "Semua jarimah yang berkaitan dengan hak Allah, padanya berlaku teori *al-tadakhul* sedangkan semua jarimah yang berhubungan dengan hak manusia, padanya tidak berlaku teori *al-tadakhul*".

³⁸A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 84.

Imam Syafi’I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tangan yang dipotong dari seorang pencuri dikalungkan dilehernya untuk beberapa saat. Tujuannya sebagai pengumuman dan sekaligus pelajaran baginya dan bagi masyarakat.³⁹

Dan menurut keterangan Ustazd Azis menerangkan bahwa:

“Pencurian adalah sebagai kebutuhan, karena biasanya itu kalau pencuri hukumannya ringan dia melakukannya lagi, apalagi jika kalau dia bisa bermain dengan polisi sehingga dia bisa lepas dan hanya membayar denda atau apa. Karena kita harus melihat efek jeranya ada atau tidak. Namun, melihat hal itu memang butuh ada upaya lain selain KUHP yang berlaku, hukum apa lagi yang ada kaitannya dengan Islam apakah dia dicambuk atau dipotong tangannya. Menurut hemat saya berharap hukum di Indonesia itu bisa mencapai target tujuannya. Tujuannya yaitu bagaimana menciptakan rasa aman bagi masyarakat, selama tidak aman atau hukumnya tidak jalan maka dibutuhkan upaya hukum lain yang lebih memberikan efek jera. Selain itu upaya untuk meminimalis yaitu di jaga kenderaannya baik-baik, dan kata Rasulullah juga demikian. Ada sebuah kisah di mana Sahabat Nabi pada waktu dia naik unta dan tiba di suatu tempat dia melepaskan untanya begitu saja, di Tanya sama Nabi, kenapa kamu melepaskan untamu?, trus dia menjawab biar nanti Allah yang menjaganya. Kemudian Nabi berkata: tidak, ikat dulu baru kamu tawakkal kepada Allah dan itu yang benar. Jadi upaya kita untuk mencegah pelaku pencurian, yah kalau bias dobel-dobel kuncinya.

Dan untuk di berlakukannya Hukum Potong tangan itu Saya kira ada ukurannya, standarnya dulu bagaimana? Jika hukuman potong tangan hendak diterapkan maka harus sesuai dengan standarnya atau nishabnya, apakah motor itu sudah bisa memenuhi standar nishabnya bahwa dia wajib dipotong tangan, kalau memenuhi standarnya, ya berarti bisa diusulkan ke Negara daripada tidak mencapai efek jeranya, mungkin Negara sudah bisa menggunakan hukum Agama sebagai sumber hukum pidananya, karena sebenarnya ada pada pancasila yang pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, berarti itu menganut Agama. Jadi semua Agama boleh mengajukan dalam rangka mencapai tujuan efek hukum, efek jera maka dibutuhkan hukum Islam”.⁴⁰

³⁹A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 85.

⁴⁰Ustazd Azis (53 Tahun), Imam Masjid Muhammad Cheng Hoo, *Wawancara*, Gowa, 26 Januari 2016.

Adapun orang yang melaksanakan hukuman adalah Ulul amri, dan atau seseorang atau sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk melakukan hal itu. Sanksi percobaan pencurian adalah ta'zir. Jadi hukuman potong tangan itu diterapkan, jika pencurian telah sempurna dan dianggap telah sempurna bila pencuri telah mengeluarkan harta yang dicurinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya dipindahkan dari pemilik kepada pencuri.

Sedangkan menurut Ustadz Ediyap mengatakan bahwa:

“Upaya untuk memberantas Tindak Pidana Pencurian Motor yaitu dengan Hukuman *had* potong tangan itu masih terlalu sulit untuk diimplementasikan di Indonesia karena masih ada peraturan yang lebih tinggi yakni sistem yang kita gunakan di Indonesia itu adalah peraturan perundang-undangan, sulit untuk digambarkan tapi kalau saya pribadi saya setuju-setuju saja jika hukum Islam yang digunakan supaya bagus tapi kita tidak boleh menyalahi peraturan yang ada diatasnya.”⁴¹

Namun, menurut keterangan Ambo Asse Selaku Ketua Umum Muhammadiyah Sul-Sel mengatakan bahwa:

“Upaya yang harus dilakukan untuk memberantas tindak pidana pencurian motor yaitu dengan meningkatkan pendidikan agama di usia dini, yakni orang tua mendidik anaknya agar kedepannya dapat mengetahui mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan, kemudian untuk orang dewasa diberi Pengetahuan Agama yang benar, diajarkan untuk mengamalkan Islam yang Baik. Dan untuk tokoh-tokoh Agama harus jalan terus dalam melakukan dakwah, seperti di lembaga pemasyarakatan misalnya diberikan pembinaan Agama kepada narapidana, diberi bimbingan dan arahan untuk tidak melakukan kejahatan lagi.”⁴²

⁴¹Ustadz Ediyap (56 Tahun), Pengelola Masjid Muhammad Cheng Hoo, *Wawancara*, Gowa, 26 Januari 2016.

⁴²Ustadz Ambo Asse (67 Tahun), Ketua Umum Muhammadiyah Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Gowa, 23 Februari 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu:

1. Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian motor yaitu ada 2 faktor yakni:
 - a. faktor Internal ialah faktor yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa ada ransangan dari luar. Faktor Internal terdiri dari:
 - 1) Faktor Intelegentia atau Individual,
 - 2) Faktor Usia,
 - 3) Faktor kelamin,
 - 4) Faktor Keturunan (Genetik).
 - b. Faktor Eksternal ialah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Faktor Eksternal terdiri dari:
 - 1) Faktor Ekonomi,
 - 2) Faktor Keluarga,
 - 3) Faktor Pendidikan Sekolah,
 - 4) Faktor Lingkungan atau pergaulan,
 - 5) Faktor Mas Media,
 - 6) Faktor Objek Sasaran
 - 7) Faktor Kelalaian Masyarakat,
 - 8) dan Faktor adanya niat dan kesempatan.
2. Upaya memberantas tindak pidana pencurian motor menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dengan 3 upaya yakni upaya Pre-

Entif yaitu langkah awal yang dilakukan dengan cara memberi himbauan kepada masyarakat. Upaya Preventif yaitu upaya lanjutan dari Pre-entif berupa patrol-patroli yang dilakukan secara terarah untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan kejahatan. Dan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya.

3. Upaya memberantas tindak pidana pencurian motor menurut Hukum Islam yaitu dengan meningkatkan pendidikan agama di usia dini, dan untuk orang dewasa diberi pengetahuan Agama yang benar, serta peran tokoh-tokoh Agama dalam memberikan bimbingan, arahan serta pembinaan Agama terhadap para pelaku pencurian motor di Lembaga Pemasyarakatan.

B. *Implikasi Penelitian*

Adapun saran-saran penyusun untuk para pihak, yaitu:

1. Bagi penegak hukum yakni polisi, sebaiknya aparat kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian motor yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar tindak pidana pencurian motor tidak semakin meningkat dalam masyarakat. Dan Hakim hendaknya memberikan sanksi yang lebih tinggi kepada pelaku agar menimbulkan efek jera yang maksimal dan jika perlu gunakan hukum Islam dalam penjatuhan pidananya.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan kepada Lapas untuk memberikan pembinaan dan pembekalan ketrampilan secara berkelanjutan kepada narapidana sebagai suatu upaya pembekalan terhadap narapidana guna menghadapi kehidupan dilingkungan masyarakat untuk kedepannya.

3. Bagi masyarakat, keharusan bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buḥārī, Al- Imām. *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Anas, Imam Malik bin. *Al Muwaththa' Imam Malik*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-hadis Hukum*. Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asse, Ambo. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi s.a.w.*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Aditama, 2005.
- Bawengan, Gerson W. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Doi, Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*. Edisi I. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Effendy, Rusdi. *Asas Hukum Pidana 1*. Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi Unhas, 1978.
- Gunadi, Ismu dan Junaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamid, M. Arfin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesia (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. Cet. I; Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hasan, Hamzah. *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- _____. *Hukum Pidana Islam 1*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013.
- Katono, Kartini. *Patologi Sosial II*. Cet. II; Jakarta: Rajawali, 1992.
- Kusumah, Mulyana W. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: CV. Armico, 1984.

- Margrhubi, Berdy Despar. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor", *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Marwan, M dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustamin, Muh. Khalifah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Cet: I; Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Bari Algensindo, 2010.
- Rizal, Pahrur. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Curanmor di Wilayah Hukum Polsek Cakranegara", *Skripsi*, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Bandung: Syaamil quran, 2012.
- Sahetapy, J. E. dan B. Mardjono Reksodiputra. *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Cet. XIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Seokanto, Soerjono dan Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*. Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Sianturi, S. R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Cet. I; Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983.
- Soegandhi, R. *K.U.H.P Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Soetodjo, Wagita. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Solahuddin. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, &Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)*, cet. VIII; Jakarta: Visi Media, 2013.
- Waluyudi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Jambatani, 2003.
- Wijaya, Abdi. *Penerapan Hukum Pidana Islam menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud)*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Wiqoya, Isna. "Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perseptif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik berupa instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh data teruji validitas dan reliabilitas, maka perlu disusun pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut:

A. Pertanyaan Untuk Polisi, yaitu:

1. Melihat jumlah pencurian yang terjadi di Kota Makassar semakin meningkat menurut Bapak Apa faktor penyebab seseorang melakukan pencurian motor?
2. Menurut Bapak di Lokasi mana di Kota Makassar yang Marak terjadi pencurian motor?
3. Menurut Bapak apa kira-kira alasannya mengapa lokasi tersebut paling marak terjadi pencurian motor?
4. Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas Tindak Pidana Pencurian Motor?
5. Menurut Bapak apakah dengan pidana penjara dapat menjamin kurangnya pencurian motor?
6. Menurut Bapak apa kira-kira solusi untuk Para pengendara agar terhindar dari pencurian Motor?

B. Pertanyaan untuk Jaksa, yaitu:

1. Melihat jumlah pencurian motor yang ada di Kota Makassar, dan sesuai dengan kasus pencurian motor yang pernah Ibu tangani, apa factor penyebabnya sehingga seseorang melakukan pencurian motor?

2. Apa yang Ibu pertimbangkan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian motor yang terjadi di Kota Makassar?
3. Apakah ada perbedaan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku yang baru pertama melakukan pencurian motor dengan pelaku yang sering melakukan pencurian motor?
4. Menurut Ibu apakah sanksi Pidana yang diberikan oleh pelaku pencurian motor dapat menimbulkan efek jera?
5. Menurut Ibu upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas tindak Pidana Pencurian motor?

C. Pertanyaan untuk Hakim, yaitu:

1. Melihat jumlah pencurian motor yang ada di Kota Makassar menurut Bapak apa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian motor?
2. Menurut Bapak apa pertimbangan Bapak dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian motor?
3. Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas tindak pidana pencurian motor?
4. Menurut apa apakah dengan penjatuhan hukuman penjara bagi pelaku pencurian motor dapat mengurangi terjadi pencurian motor?
5. Menurut Bapak apakah dengan Hukuman penjara dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pencurian motor?
6. Menurut Bapak solusi apa yang harus dilakukan oleh para pengendara agar terhindar dari pencurian motor?

D. Pertanyaan untuk Narapidana Pencurian Motor, yaitu:

1. Apa faktor penyebab sehingga anda melakukan pencurian motor?

2. Apakah anda telah melakukan pencurian motor sebelumnya?
3. Apakah anda melakukan pencurian motor dengan sendiri atau bersama dengan teman anda?
4. Bagaimana cara anda melakukan pencurian motor tersebut dan Pada waktu apa anda melakukan pencurian motor?
5. Di lokasi mana anda melakukan pencurian motor dan motor yang anda curi anda kemanakan?
6. Hasil dari curian motor tersebut anda gunakan untuk apa?

E. Pertanyaan untuk Ulama (Pakar Islam), yaitu:

1. Apakah Ustadz sering mendengar kasus pencurian motor yang terjadi di Kota Makassar?
2. Menurut Ustadz bagaimana jika pelaku pencurian motor dikenakan sanksi hukuman menurut hukum Islam?
3. Menurut Ustadz, kira-kira efektif tidak jika pelaku pencurian motor dikenakan sanksi hukuman Nasional seperti Hukuman penjara?
4. Menurut Ustadz, kira-kira pantaskan jika diberlakukan Hukum Islam terhadap pelaku pencurian motor dan dapat menimbulkan efek jera?
5. Menurut Ustadz upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas tindak pidana pencurian motor?
6. Menurut Ustadz apa solusi untuk para pelaku maupun para korban terkait dengan tindak pidana pencurian motor?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERTANYAAN UNTUK POLISI

1. Melihat jumlah Pencurian yang terjadi di Kota Makassar semakin meningkat menurut Bapak Apa faktor penyebab seseorang melakukan pencurian motor?

Jawab: 1. Tentang Masalah ekonomi,

2. Karena mereka diperalat atau dijanjikan sesuatu,

3. Karena terpaksa. Dalam arti kata didalam lingkup pergaulan mereka itu, teman-teman mereka itu memaksa mereka untuk melakukan sesuatu.

Misalnya: kalo kamu tidak mau ikut dengan perkataan kami maka kamu tidak boleh lagi gabung dengan kami-kami di sini, dan utamanya terhadap pelaku-pelaku masih dibawah umur.

2. Menurut Bapak di Lokasi mana di Kota Makassar yang Marak terjadi pencurian motor?

Jawab: 1. Polsek Rappocini, atau wilayah kecamatan Rappocini,

2. Polsek Panakukang, dan

3. Polsek Tamalanrea

3. Menurut Bapak apa kira-kira alasannya mengapa lokasi tersebut paling marak terjadi pencurian motor?

Jawab: Karena Polsek Rappocini itu mencakup daerah bisnis dan daerah orang bekerja, daerah perkantoran banyak, perusahaan banyak dan banyak karyawan, dan sebagainya. Terus daerah panakukan kita tahu sendiri bahwa terdapat Mall Panakukang, dan banyak orang yang memarkir motornya untuk masuk berbelanja. Dan kalau untuk Polsek tamalanrea itu adalah daerah kampus, kurang lebih seperti itu yang sistem pengamanan

swadayaanya itu kurang maksimal, seperti Unhas memang banyak satpamnya namun pengamanan keamanannya belum maksimal. Dan di tempat-tempat bisnisnya kan banyak Tukang Parkir namun tempat parkirnya itu tidak resmi.

4. Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas Tindak Pidana Pencurian Motor?

Jawab: 1. Tidak terlepas dari pemilik kendaraan itu sendiri, kalau dia memarkir kendaraannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang pernah disosialisasikan kepada masyarakat, simpan di tempat yang aman, pake kunci stand.

2. Terus pengendara harus memarkir di tempat yang resmi untuk tanggung jawabnya. Dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat itu sendiri dalam mengamankan kendaraannya.

3. Untuk daerah-daerah kampus itu diberlakukan STNK jika hendak keluar dari kampusnya, dan setiap kampuskan memiliki satpam dipintu masuk bisa tidak diberlakukan seperti di Mall.

5. Menurut Bapak apakah dengan pidana penjara dapat menjamin kurangnya pencurian motor?

Jawab: Melihat pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang, dan misalkan hukuman Curanmor itu dihukum mati, masih ada tidak orang yang mau mencuri motor, tapi kan tidak seperti itu. Polisi kan tugasnya Cuma angkat dan memproses sesuai dengan prosedurnya lalu diserahkan ke Hakim nanti Hakim yang sidangkan. Dan jika Hakim memvonis hukumannya cuma 6 bulan salahnya siapa, bukan salahnya

Polrestabes Makassar, 21 januari 2016

Polisi. Coba lihat dari hukuman-hukuman yang diberikan palingan 6 bulan, 9 bulan coba diber hukuman 5 tahun misalnya. Karena vonisnya Cuma 6 bulan 7 bulan sehingga mereka menganggap itu ringan. Dan berbicara masalah hukuman itu polisi tidak bisa menetapkan karena tugas polisi hanya melakukan tegas terhadap pelaku. Dan kita harus ikut aturan hukumannya.

Nama : Awaluddin

Jabatan : Kaurmin Satreskrim

Pangkat : AIPTU

Umur : 35 Tahaun

PERTANYAAN UNTUK POLISI

1. Melihat jumlah Pencurian yang terjadi di Kota Makassar semakin meningkat menurut Bapak Apa faktor penyebab seseorang melakukan pencurian motor?

Jawab: 1. Faktor lingkungan dan pergaulan

2. Faktor obat-obatan,

3. Dan juga karena adanya kesempatan melihat banyak motor, mini market tidak ada tukang parkirnya yang jaga. Kan factor NK ji toh Niat dan Kesempatan, meskipun tidak ada niat tapi ada kesempatan

4. Kurang pengawasan, tokoh-tokoh masyarakat apa. Orang tua kurang pengawasan terhadap anaknya, orang tua kurang pengawasan terhadap lingkungan pergaulannya. Menurut Psikologi itu dimana anak paling lama disitu ia dibentuk. Misalnya anak berada dilingkungan keluarganya 2 jam lah kemudian dia berada dilingkungan temannya 4-5 jam, tentu lebih berpengaruh ke teman-temannya. Dan bagus-bagus itu jika 2 jam dan malah biasa Cuma berapa menit ji lingkungan keluarganya.

2. Menurut Bapak di Lokasi mana di Kota Makassar yang Marak terjadi pencurian motor?

Jawab: Kampus Unismuh

3. Menurut Bapak apa kira-kira alasannya mengapa lokasi tersebut paling marak terjadi pencurian motor?

Jawab: Mereka dikira lingkungan di situ karena lingkungan di kampus kan umur Mahasiswa yang di kampus dengan umur mereka sebaya jadi gampang

berbaurnya, jadi dia masuk ke lingkungan kampus itu seolah-olah dia juga Mahasiswa. Maka tidak heran beberapa kampus, tempat kost marak terjadi karena mereka berbaur dia lihat sebayanya dan seumuran jadi orang beranggapan bahwa orang ini adalah temannya jadi orang tidak ada curiga. Pelaku itu bertindak dimana orang tidak terlalu merasa curiga tentu dia akan cari orang yang sebayanya.

4. Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas Tindak Pidana Pencurian Motor?

Jawab: 1. Banyak cara dan kembali kepada pengendara itu sendiri, harus waspada dan kalau perlu gunakan kunci ganda, jika sudah kunci leher kalau bisa dobel lagi. Dan untuk di kampus gunakan pengamanan security yang bukan hanya berjaga didepan, makanya orang masuk itu periksa STNK. Dan untuk tempat kost dijaga keamanannya jika perlu siapkan CCTV, setidaknya jika sudah masuk dilingkungan kost ya setidaknya digembok baik-baik, yang penting itu tingkatkan keamanannya.

2. Program KB perlu dijalankan karena semua berentetan, disaat semua orang kawin terus banyak anak dan tidak mampu membiayai anaknya dan anaknya tidak terurus, larinya ke mana? ke pergaulan nakal.

3. aktifkan kembali Pos kambling

5. Menurut Bapak biasanya mereka mencuri dengan cara Apa?

Jawab: Dan biasanya dia mencuri itu mencuri menggunakan Leter T/ Kunci T yang ujungnya runcing, dan banyak juga curian motor yang dilakukan dengan cara dorong.

6. Menurut Bapak Apakah dengan pidana penjara dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pencurian motor?

Jawab: Jika berbicara mengenai efek jera kembali sama pribadinya, kalau kita yang menilai kan sebenarnya masing-masing manusia bisa berubah, entah itu nah penggunaan 6 bulan itu dengan apa?, saya kira itu kembali juga ke aparatnya yang jaga. Dan banyak tempat seperti Lapas dijadikan sebagai tempat reuni, dalam artian bertukar ilmu.

7. Menurut Bapak apa kira-kira solusi untuk Para pengendara agar terhindar dari pencurian Motor?

Jawab: 1. Aktifkan kembali jam malam, tokoh masyarakat harus menjadi seorang pendidik dilingkungannya mengawasi masyarakatnya, warganya. Dan terutama orang tua yang paling berperan penting jangan sampai orang tua lalai dalam mengawasi anaknya. Dan sering itu terjadi pas di tangkap bilang anakku baek ji, sering ji di rumah tapi apa begal diluar.

2. Harus dikontrol berbagai warnet karena biasa tempat itu merupakan ajang ngumpul, harus juga diawasi apotek terkait peredaran obat-obatan.

3. Untuk daerah kampus tingkat pengamanan, usahakan jalur 1 pintu dan jangan ada banyak pintu, control orang-orang yang masuk dan keluar dan kalau bisa gunakan kartu Mahasiswa itu sebagai kartu parker. Dan dari pihak kami tetap jalan ada namanya *Goes to Campus*.

Nama : Adi Jaya B.

Jabatan : Ba. Subbagkum

Pangkat : Brigpol

Umur : 28 Tahun

PERTANYAAN UNTUK JAKSA

1. Melihat jumlah pencurian motor yang ada di Kota Makassar, dan sesuai dengan kasus pencurian motor yang pernah Ibu tangani, apa factor penyebabnya sehingga seseorang melakukan pencurian motor?

Jawab: 1. Adanya Faktor Ekonomi

2. Faktor senang-senang, bukan orang susah tapi memang mau saja senang-senang
3. Adanya kesempatan, yang dulunya tidak ada niat tapi ada kesempatan maka muncul mi niat.
4. Adanya memang niat dari awal, karena memang adanya niat dari awal kemudian jika keluar liat motor meskipun telah dikunci namun merusak kunci tersebut dengan menggunakan kunci T

2. Apa yang Ibu pertimbangkan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian motor yang terjadi di Kota Makassar?

Jawab: Kita melihat dari segi perbuatannya, kalo misalnya karena faktor ekonomi Kita tidak bisa langsung percaya, kalau memang faktor ekonomi ada tidak buktinya, dan kalau memang karena factor ekonomi juga tetap harus dihukum jangan sampai itu cuma akal-akalan atau alasan mereka saja, apalagi kalau dia residivis. Dan ini tetap dipertimbangkan tapi ini harus adil dan dia tetap dihukum untuk menimbulkan efek jera.

3. Apakah ada perbedaan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku yang baru pertama melakukan pencurian motor dengan pelaku yang sering melakukan pencurian motor?

Jawab: Beda itu dek orang yang baru pertama kali dengan orang yang sudah dua kali melakukan, berarti itu tidak ada efek jera, jadi kita harus memberikan hukuman yang lebih tinggi, dan berbeda juga hukumannya bagi pelaku yang barang buktinya dikembalikan karena belum sempat menikmati dan itu dipertimbangkan. Dan adapula perbedaan bagi orang yang barang buktinya dikembalikan dengan barang buktinya yang tidak dikembalikan dan semua ini tetap dihukum dan hukumannya itu tidak jauh perbedaannya.

4. Menurut Ibu apakah sanksi Pidana penjara yang diberikan oleh pelaku pencurian motor dapat menimbulkan efek jera?

Jawab: Tergantung orangnya, karena kita sudah berusaha untuk menghukumnya sebagaimana perbuatannya, kita melihat hal-hal yang memberat, hal-hal yang meringankan, dan kalau misalnya dia tetap tidak jera kemudian dia masuk lagi maka kita akan memberikan hukuman yang berat lagi.

5. Menurut Ibu upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas tindak Pidana Pencurian motor?

Jawab: Kembali kepada pengendara itu sendiri, kemanan ditingkatkan, ada yang berjaga-jaga, harus lebih berhati-hati, parkir motor sebagaimana mestinya, parkir di tempat yang aman, kunci baik-baik, dan untuk kampus itu kembali kepada pengelola kampus, karena jika pengamanannya ketat maka tidak ada celah, kunci motor baik-baik, simpan helmnya juga baik-baik. Kemudian pengamanannya diperketat dan penjagaannya yang bagus yang mengetahui mana pemilik motor yang sebenarnya, dan kalau perlu gunakan karcis seperti di Mall-mall.

Kejaksaan Negeri Makassar, 22 Januari 2016

Nama : A. Suci Rahmadani

Jabatan : Jaksa Fungsional

Pangkat : Ajun Jaksa

Umur : 30 Tahun

PERTANYAAN UNTUK HAKIM

1. Melihat jumlah pencurian motor yang ada di Kota Makassar menurut Bapak apa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian motor?

Jawab: 1. Putus sekolah atau faktor lingkungan untuk anak-anak

2. Masalah ekonomi baik anak-anak maupun orang dewasa. Dan biasanya anak-anak itu tujuannya untuk bersenang-senang yang berbeda dengan orang dewasa demi kepentingan keluarganya.

3. Karena kegagalan Pendidikan, baik itu pendidikan di rumah yakni keluarganya maupun pendidikan di sekolah dan jika ia pelakunya Mahasiswa maka dia gagal pendidikan.

4. Karena adanya penadah yaitu pembeli motor hasil curian yang didukung oleh konsumen, yang memang kerjanya tukang suplay motor curian baik kap-kapnya dijual demi mendapatkan uang.

2. Menurut Bapak apa pertimbangan Bapak dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian motor?

Jawab: Yang dipertimbangkan itu sesuai dengan perbuatannya, dan jika pelakunya anak-anak maka hukumannya berbeda dengan orang dewasa. Selain itu, meskipun ia anak-anak namun karena *Residivis* maka hukumannya berbeda pula yakni hukumannya dinaikkan dari hukuman sebelumnya.

3. Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas tindak pidana pencurian motor?

Jawab: 1. Lingkungan keluarganya harus diperbaiki,

2. Pendidikan Agamanya lebih ditingkatkan,
3. Pendidikan Sekolahnya, jangan sampai dia putus sekolah.
4. Yang terpenting adalah faktornya penyebabnya dapat dituntaskan terlebih dahulu maka ini akan mengurangi pencurian motor
4. Menurut Bapak apakah dengan penjatuhan hukuman pidana penjara bagi pelaku pencurian motor dapat mengurangi terjadi pencurian motor?

Jawab: Sangat Subjektif, karena masih ada sebagian kecil yang mengulangi kembali perbuatannya atau dengan kata lain *Residivis*. Namun, tidak semuanya palingan ada sekitar kurang lebih 3 % dari 100 kejahatan pencurian motor.

5. Menurut Bapak apakah dengan Hukuman penjara dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pencurian motor?

Jawab: Harapannya mereka jera tetapi masih ada pula yang *Residivis*. Dan lagi dilihat dari segi perbuatannya dan disesuaikan dengan hukumannya. Misalnya diberi Hukuman 3 tahun penjara, dan ini kelamaan maka dapat merugikan keuangan Negara.

Nama : Suparman Nyompa, SH., MH

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Mks

Pangkat : Gol. IV/ B

Umur : 52 Tahun

PERTANYAAN UNTUK HAKIM

1. Melihat jumlah pencurian motor yang ada di Kota Makassar menurut Bapak apa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian motor?

Jawab: 1. Faktor karena wataknya memang seorang pencuri seperti teorinya Lambrosso,

2. Bisa juga karena faktor lingkungan,

3. Bisa juga karena desakan keluarga.

4. Juga karena kurangnya Pendidikan keagamaan.

2. Menurut Bapak apa pertimbangan Bapak dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian motor?

Jawab: Yang dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman yaitu dilihat dari kepastian Hukumnya, apa perbuatan itu benar-benar sudah termasuk dalam kepastian hukum.

3. Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas tindak pidana pencurian motor?

Jawab: Upayanya yaitu ada 2 yaitu upaya preventif dan upaya represif. Selain itu masyarakat harus lebih berhati-hati. Karena kan terjadinya suatu kejahatan karena adanya kesempatan dari pengendara itu sendiri.

4. Menurut apa apakah dengan penjatuhan hukuman penjara bagi pelaku pencurian motor dapat mengurangi terjadi pencurian motor?

Jawab: Yah menurut harapan kami dengan hukuman pidana penjara itu dapat mengurangi terjadinya curanmor

5. Menurut Bapak apakah dengan Hukuman penjara dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pencurian motor?

Jawab: Yah itu tadi kami berharap supaya mereka itu jera dengan adanya pidana penjara.

Nama : Ibrahim Palino, S. H., M. H

Jabatan: Hakim Pengadilan Negeri Makassar

Umur : 54 Tahun

PERTANYAAN UNTUK NARAPIDANA

1. Apa faktor penyebab sehingga anda melakukan pencurian motor?

Jawab: Temanku ajakka

2. Apakah anda telah melakukan pencurian motor sebelumnya?

Jawab: Barupi, berani ja sumpah baru itu hari

3. Apakah anda melakukan pencurian motor dengan sendiri atau bersama dengan teman anda?

Jawab: Sama temanku, temanku yang rusakki kuncinya terus saya jaga-jaga ka, ku awasi temanku supaya tidak ada orang liat-liatki,

4. Bagaimana cara anda melakukan pencurian motor tersebut dan Pada waktu apa anda melakukan pencurian motor?

Jawab: Dirusakki kuncinya pake kunci T terus di sambung langsung mi di stop kontak ki, dan dilakukan pada siang hari.

5. Di lokasi mana anda melakukan pencurian motor dan motor yang anda curi anda kemanakan?

Jawab: Di Ratulangi, dan itu motor ku pakeki kah tidak ada motorku, sudahnya itu rencana mau ku jualki itu motor baru mauka beli baju, celana sama topi.

Nama : MSP

Umur : 16 Tahun

PERTANYAAN UNTUK NARAPIDANA

1. Apa faktor penyebab sehingga anda melakukan pencurian motor?

Jawab: Coba-coba, na ajakka temanku. Pertamanya kalinya coba-coba ji terus kedua kalinya didapat mi, tapi sempat ji berhenti iya, sempat berhenti 2 bulan, tapi itu waktu nah ajakka temanku bilangka takut ja toh kah sambil bawa itu pertamanya ragu-raguka terus nah kompai-kompaika bilang dapat ki nanti motor tolo. Pertamanya Na ajakka temanku terus penasaranka juga jadi saya coba-coba mi, tapi sempat jeka takut-takut nanti didapatika tapi nah bilang temanku tidak ji ikut meko saja, jadi saya ikuti mi, terus yang kedua kalinya na ajakka lagi temanku tapi bilangka ayo mi tapi terakhir kalinya mi ini nah, na bilang temanku iya terakhirmi, sudahnya itu tidak pernah ma lagi mencuri.

2. Apakah anda telah melakukan pencurian motor sebelumnya?

Jawab: 2 kali sama yang ini

3. Apakah anda melakukan pencurian motor dengan sendiri atau bersama dengan teman anda?

Jawab: Samaka Temanku

4. Bagaimana cara anda melakukan pencurian motor tersebut dan Pada waktu apa anda melakukan pencurian motor?

Jawab: Pada malam hari, diambil kunci motornya, sementara jalan itu motor langsung diambil kunci motornya langsung berhenti mi itu motor baru diambil mi motornya, terus digaratta ji saja. Di kasih takut-takut ji saja tapi pake parang.

5. Di lokasi mana anda melakukan pencurian motor dan motor yang anda curi anda kemanakan?

Jawab: Di bagian atas di kota, pada waktu tengah malam atau subuh-subuh. dan Motor itu dijual di pampang

6. Hasil dari curian motor tersebut anda gunakan untuk apa?

Jawab: Saya bagi hasil sama temanku terus dipake pergi jalan-jalan sama teman-temanku, pake pi senang-senang apa.

Nama : RY

Umur : 16 Tahun

PERTANYAAN UNTUK NARAPIDANA

1. Apa faktor penyebab sehingga anda melakukan pencurian motor?

Jawab: Tidak ji, khilafka itu hari, khilafka.

2. Apakah anda telah melakukan pencurian motor sebelumnya?

Jawab: Tidak. Baruka itu pertama kalinya.

3. Apakah anda melakukan pencurian motor dengan sendiri atau bersama dengan teman anda?

Jawab: Samaka temanku, temanku panggilka.

4. Bagaimana cara anda melakukan pencurian motor tersebut?

Jawab: Tengah malam, di depan rumahnya orang

5. Motor yang anda curi anda kemanakan?

Jawab: Temanku sudah bawa lariki.

6. Hasil dari curian motor tersebut anda gunakan untuk apa?

Jawab: Nah jualki temanku baru hasilnya nah kasihka juga.

Nama : IS

Umur : 17 Tahun

PERTANYAAN UNTUK PAKAR ISLAM

1. Menurut Ustadz bagaimana jika pelaku pencurian motor dikenakan sanksi hukuman menurut hukum Islam?

Jawab: Kalau Hukum Islam yang diberlakukan saya kira itu efektif karena Hukum Islam sangat efektif karena menekan jiwa seseorang untuk melakukan kejahatan, karena Hukum Islam merupakan Hukum yang ditetapkan oleh Allah s.w.t.

2. Menurut Ustadz, kira-kira efektif tidak jika pelaku pencurian motor dikenakan sanksi hukuman Nasional seperti Hukuman penjara?

Jawab: Kurang efektif karena yang efektifnya itu diberlakukan Hukum Islam.

3. Menurut Ustadz upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas tindak pidana pencurian motor?

Jawab: Meningkatkan pendidikan agama di usia dini, yakni orang tua mendidik anaknya agar kedepannya dapat mengetahui mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan, kemudian untuk orang dewasa diberi Pengetahuan Agama yang benar, diajarkan untuk mengamalkan Islam yang Baik. Dan untuk tokoh-tokoh Agama harus jalan terus dalam melakukan dakwah, seperti di lembaga pemasyarakatan misalnya diberikan pembinaan Agama kepada narapidana, diberi bimbingan dan arahan untuk tidak melakukan kejahatan lagi

4. Menurut Ustadz apa solusi untuk para pelaku maupun para korban terkait dengan tindak pidana pencurian motor?

Samata, Gowa, 23 Februari 2016

Jawab: Dikembalikan motornya, kemudian mencurinya ditemukan dan barangnya ditemukan juga, kemudian pencurinya di Hukum.

Nama : Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag

Jabatan : Ketua Umum Muhammadiyah Sulawesi Selatan

Umur : 67 Tahun

PERTANYAAN UNTUK PAKAR ISLAM

1. Apakah Ustadz sering mendengar kasus pencurian motor yang terjadi di Kota Makassar?

Jawab: Sering, dan malahan anak saya pernah kecurian motornya.

2. Menurut Ustadz bagaimana jika pelaku pencurian motor dikenakan sanksi hukuman menurut hukum Islam?

Jawab: Kalau menurut saya sebenarnya sulit untuk digunakan Hukum Islam karena kan kita di Indonesia menggunakan peraturan yang ada, kita kan berpatokan pada Peraturan perundang-undangan karena itu kan merupakan payung. selain itu, kita kan tahu bahwa peraturan yang ada tidak boleh melampaui batas dengan peraturan yang ada diatasnya.

3. Menurut Ustadz, kira-kira efektif tidak jika pelaku pencurian motor dikenakan sanksi hukuman Nasional seperti Hukuman penjara?

Jawab: Yah mungkin efektif saja karena selama ini kan yang diguakan adalah KUHP yaitu peraturan perundang-undangan.

4. Menurut Ustadz, kira-kira pantaskan jika diberlakukan Hukum Islam terhadap pelaku pencurian motor dan dapat menimbulkan efek jera?

Jawab: Kalau saya di mintai keterangan terkait hal itu menurut sangat sulit untuk digambarkan karena kan Hukum Islam sangat luas. Tapi kalau menurut saya yah setuju, setuju saja jika Hukum Islam itu diterapkan di Indonesia.

Nama : Ustadz Ediyap

Jabatan : Pengelola Masjid Muhammad Cheng Hoo

Umur : 56 Tahun

PERTANYAAN UNTUK PAKAR ISLAM

1. Apakah Ustadz sering mendengar kasus pencurian motor yang terjadi di Kota Makassar?

Jawab: Sering sekali, malahan motorku pernah kecurian.

2. Menurut Ustadz bagaimana jika pelaku pencurian motor dikenakan sanksi hukuman menurut hukum Islam?

Jawab: Kalau menurut saya setuju jika pelakunya itu di potong tangannya, kalau perlu kakinya juga dipotong, tapi kan saya kira ada ukurannya. Dan untuk di berlakukannya Hukum Potong tangan itu Saya kira ada ukurannya, standarnya dulu bagaimana? Jika hukuman potong tangan hendak diterapkan maka harus sesuai dengan standarnya atau nishabnya, apakah motor itu sudah bisa memenuhi standar nishabnya bahwa dia wajib dipotong tangan, kalau memenuhi standarnya, ya berarti bisa diusulkan ke Negara daripada tidak mencapai efek jeranya, mungkin Negara sudah bisa menggunakan hukum Agama sebagai sumber hukum pidananya, karena sebenarnya ada pada pancasila yang pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, berarti itu menganut Agama. Jadi semua Agama boleh mengajukan dalam rangka mencapai tujuan efek hukum, efek jera maka dibutuhkan hukum Islam. Harus ada standarnya karena jangan sampai cuma sandal dia curi juga harus dipotong tangannya.

3. Menurut Ustadz, kira-kira efektif tidak jika pelaku pencurian motor dikenakan sanksi hukuman Nasional seperti Hukuman penjara?

Jawab: Kalau bilang efektif atau tidak yah perlu sebenarnya ditinjau persoalannya memang pencurian itu sebagai sudah kebutuhan, nah yang kita mau tahu itu efek jeranya atau tidak, biasanya kalau pencuri itu kan ya kalau hukumannya ringan dia akan lakukan lagi apalagi kalau ada dia bisa bermain dengan polisi sehingga dia akan bisa lepas dengan hanya membayar denda atau apa. Menurut hemat saya

4. Menurut Ustadz, kira-kira pantaskan jika diberlakukan Hukum Islam terhadap pelaku pencurian motor dan dapat menimbulkan efek jera?

Jawab: Untuk melihat efek jeranya memang butuh upaya lain selain KUHP yang berlaku, hukum apa lagi yang ada kaitannya dengan Hukum Islam, jadi terapkan apakah dia dicambuk atau dipotong tangannya, kalau menurut hemat saya sebagai masyarakat menurut saya Hukum di Indonesia itu bisa mencapai target tujuannya. Tujuannya yaitu bagaimana menciptakan rasa aman bagi masyarakat, selama tidak aman, selama hukum itu tidak jalan, maka dibutuhkan upaya hukum lain yang lebih bisa memberi efek jera.

5. Menurut Ustadz upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas tindak pidana pencurian motor?

Jawab: Dijaga kendaraannya Baik-baik, karena Nabi juga begitu pesannya karena ada seorang sahabat dulu dia naik unta, tiba di suatu tempat dia melepaskan untanya, kemudian dia ditanya kenapa kamu melepaskan untamu?, katanya nanti biar Allah yang jaga, terus Nabi menjawab yah tidak, kamu ikat dulu lalu kamu tawakkal kepada Allah, itu yang benar. Jadi sekarang ini upaya kita untuk mencegah pencuri supaya yah kalau bisa dobel-dobel itu kuncinya supaya pencurian itu bisa dicegah.

Samata, Gowa, 26 Januari 2016

Nama : Ustadz Azis

Jabatan : Imam Masjid Cheng Hoo

Umur : 53 Tahun



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Radiaty, anak ke-4 dari 6 bersaudara yang terlahir dari buah kasih seorang Ayah bernama Abd. Kadir dan Ibu bernama Hadawiah, Lahir di Tappere pada tanggal 09 Juli 1994 yang berasal dari Desa Massenreng Pulu Kec. Sibulue Kab. Bone. Jenjang pendidikan SD Inpres Negeri 3/77 Masenreng Pulu (2003-2006) dan melanjutkan sekolah menengah pertama pada SMP Negeri 3 Sibulue Kab. Bone (2006-2009), dan lanjut Pada Sekolah di SMA Negeri 2 Sinjai Utara Kab. Sinjai (2009-2012). Adapun pengalaman organisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan sebagai Sekretaris Umum II, dan telah ikut bergabung pada Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Organisasi Daerah Bone, serta ikut berperan aktif dalam Organisasi Generasi Baru Indonesia (GENBI).